



**PEDAGANG KAKI LIMA DAN REVITALISASI ALUN-ALUN
JEMBER: ANALISIS BENTUK RESISTENSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana,
pada Program Studi Sosiologi*

Skripsi

Oleh

Putri Ayu Pratna Paramita

210910302127

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SOSIOLOGI

JEMBER

2025

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt dan atas dukungan dari orang-orang tercinta di samping saya, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan rendah hati, saya ucapkan terima kasih dan persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Swt yang telah memperlancar proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Segala bentuk sehat jasmani dan rohani yang selalu penulis syukuri setiap harinya hingga membawa penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab yang ia percayakan.
2. Kepada orang tua dan adik penulis tercinta yang selalu mendoakan penulis dengan tulus dan tidak pernah putus. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis selama masa perkuliahan ini. Tanpa doa mereka penulis tidak yakin dapat melewati segala hiruk pikuk masa perkuliahan ini.
3. Untuk kakakku tersayang alm. Putri Himami Hapsawati Amir, yang sudah memberikan banyak sekali motivasi dan dorongan agar tidak meninggalkan tanggung jawab. Penulis dapatkan gelar ini untuk semua rasa bersalah dan rasa terima kasih penulis kepada alm. Terima kasih karena tidak pernah salah untuk dijadikan panutan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau, untuk kita berdua sebagai anak pertama yang mengemban banyak harapan.
4. Penulis Putri Ayu Pratna Paramita yang telah berhasil melewati segala rintangan dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak pernah memilih berhenti atas semua hal yang telah dimulai. Terima kasih dan maaf karena perjuangan hingga titik ini tidak semulus yang dulu dibayangkan, namun setidaknya berhasil selesai dengan elegan. Selamat atas badai yang sudah berhasil diterjang dan dilawan.

MOTTO

“Kemarin Sudah Berlalu, Hari Besok Belum Tiba, Hari Ini Belum Pasti”¹

(Yu Mi Ji Dalam *Our Unwritten Seoul*, 2025)

“Won’t You Give Yourself A Try?”²

(Give Yourself A Try – *The 1975*)

“Kalau Aku Gagal, Mohon Tunggu Dan Jangan Pergi.”³

(Amin Paling Serius - *Nadin Amizah*)

¹ Yu Mi Ji dalam *Our Unwritten Seoul*, drama Korea Selatan, 2025.

² The 1975, “Give Yourself a Try,” dalam album *A Brief Inquiry Into Online Relationships*, Dirty Hit Records, 2018.

³ Nadin Amizah, “Amin Paling Serius,” dalam album *Selamat Ulang Tahun*, Sorai, 2020.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Ayu Pratna Paramita

NIM : 210910302127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Pedagang Kaki Lima dan Revitalisasi Alun-Alun Jember: Analisis Bentuk Resistensi*" adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Putri Ayu Pratna Paramita

NIM 210910302127

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "*Pedagang Kaki Lima dan Revitalisasi Alun-Alun Jember: Analisis Bentuk Resistensi*" telah diuji dan disahkan oleh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Dr. Dodik Harnadi, S.Sos., M.Sosio.

198707042023211013

Tanda Tangan

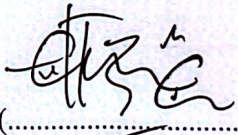


(.....)

2. Pembimbing Anggota

Nurina Adi Paramitha, S.Sos., M.Sos.

198907172022032013



(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nurul Hidayat, S.Sos., M.UP.

197909142005011002

Tanda Tangan




(.....)

2. Penguji Anggota

Mukhammad Handy Dwi Wijaya, S.Sos., M.Sosio.

199603112024061001



(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan revitalisasi alun-alun jember. Kebijakan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini membawa dampak besar terhadap keberlangsungan hidup para PKL sebagai kelompok yang mencari nafkah di ruang publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan PKL menggunakan Teori Resistensi dari James C. Scott terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam menggali pengalaman para PKL yang terdampak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL cenderung bersifat *hidden transcript*. Bentuk resistensi yang dilakukan meliputi: (1) perlawanan politik dengan tidak memilih bupati menjabat kembali (2) adaptasi strategi dagang (3) bertahan dalam tekanan (4) menjaga hubungan dengan aparat. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan diam-diam merupakan bentuk perlawanan yang signifikan bagi kelompok rentan dalam menghadapi tekanan yang tidak berpihak.

Kata kunci: hidden transcript, James C. Scott, pedagang kaki lima, resistensi, revitalisasi alun-alun jember

Abstract

This study discusses the forms of resistance carried out by street vendors (hawker) against the revitalization policy of alun-alun jember. The government's revitalization policy has significantly impacted the livelihoods of hawker, who rely on public spaces to make a living. The aim of this research is to gain deeper insights into the forms of resistance expressed by hawker toward this policy. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach to explore the experiences of the affected vendors. Data were collected through observation, interviews, and field documentation. Data validity was tested using source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study reveal that the resistance shown by hawker tends to take the form of a hidden transcript. The identified forms of resistance include: (1) political resistance by choosing not to re-elect the incumbent regent, (2) adaptive trading strategies, (3) survival under pressure, and (4) maintaining relations with authorities. This study explains that hidden resistance is a significant form of protest for vulnerable groups in facing unsupportive pressures.

Keywords: *alun-alun jember revitalization, hidden transcript, James C. Scott, resistance, street vendors*

RINGKASAN

Penelitian ini membahas mengenai bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (pkl) terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mempercantik ruang publik, namun dalam prosesnya menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks. Revitalisasi tidak hanya memindahkan secara fisik para pedagang kaki lima dari ruang yang telah lama mereka manfaatkan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan ekonomi, rasa aman, dan posisi sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat kota.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sebagai respon terhadap kebijakan revitalisasi yang dirasa tidak berpihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, guna menangkap makna dan pengalaman subjektif para pedagang kaki lima yang terdampak. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci (terdiri dari pedagang kaki lima dan pengurus paguyuban), serta dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi yang dilakukan oleh pkl cenderung bersifat tersembunyi atau *hidden transcript*, sebagaimana dikemukakan dalam teori resistensi oleh James C. Scott. Tidak ditemukan bentuk resistensi terbuka (*public transcript*) seperti demonstrasi atau penolakan frontal terhadap kebijakan, sebab para pkl mempertimbangkan risiko sosial dan ekonomi yang dapat merugikan mereka lebih jauh. Oleh karena itu, bentuk-bentuk resistensi yang muncul lebih bersifat simbolik, diam-diam, dan dilakukan dalam keseharian mereka. Empat bentuk resistensi utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perlawanan Politik, (2) Manufer Dagang, (3) Bertahan Dalam Tekanan, (4) Menjaga Relasi Kondusif Dengan Aparat, dilakukan dengan cara membangun

komunikasi damai dengan Satpol PP dan petugas pemerintah, serta aktif dalam paguyuban agar tetap mendapatkan pengakuan meski informal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa para pedagang kaki lima memiliki kesadaran kolektif terhadap ketimpangan yang mereka hadapi, namun memilih untuk tidak melawan secara langsung karena menyadari posisi mereka yang rentan. Hal ini selaras dengan konsep *weapons of the weak* (senjata kaum lemah) dari Scott, bahwa kelompok subordinat sering kali menggunakan strategi halus dan tak kentara untuk mengganggu atau menunda dominasi dari kelompok yang lebih berkuasa. Bentuk perlawanan ini meskipun tampak pasif, namun mengandung makna politik yang dalam, yakni mempertahankan ruang hidup dan identitas sosial mereka sebagai bagian dari ruang kota. Resistensi pedagang kaki lima menjadi penting untuk dibahas bukan hanya sebagai reaksi spontan, tetapi sebagai strategi bertahan dalam sistem yang cenderung menyingkirkan kelompok-kelompok rentan dari ruang-ruang ekonomi dan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ruang publik seharusnya dikelola secara inklusif, dan revitalisasi yang ideal adalah yang melibatkan partisipasi warga secara bermakna, bukan sekadar menata kota demi estetika atau kepentingan tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan agar lebih bijak dalam merancang kebijakan revitalisasi ruang publik di masa mendatang. Suara-suara kecil seperti para pedagang kaki lima ini perlu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi sosiologi perkotaan dan kajian resistensi di Indonesia, terutama dalam konteks relasi kuasa antara negara dan masyarakat akar rumput.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "*Pedagang Kaki Lima dan Revitalisasi Alun-Alun Jember: Analisis Bentuk Resistensi*" ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Dr. Rosnida Sari, S.Ag., M.Si., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi Sosiologi, atas arahan dan kebijakan akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Dr. Dodik Harnadi, S.Sos., M.Sosio, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Nurina Adi Paramitha, S.Sos., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.
5. Nurul Hidayat, S.Sos., M.UP., selaku Dosen Penguji I, dan Mukhammad Handy Dwi Wijaya, S.Sos., M.Sosio., selaku Dosen Penguji II, atas kritik, saran, dan pertanyaan yang konstruktif sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih tajam dan bermakna.
6. Nurina Adi Paramitha, S.Sos., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah mendampingi penulis sejak awal masa studi dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

7. Seluruh dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Jember, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
8. Tenaga Kependidikan FISIP Universitas Jember, atas bantuan dan pelayanan yang ramah serta mendukung kelancaran proses studi penulis.
9. Haidar Sofi Al Kharis atas semua dukungan dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih karena selalu mendampingi penulis disaat titik terendah dan hilang motivasi. Skripsi ini dapat selesai tepat waktu berkat kehadiran beliau dari awal hingga akhir. Semoga semua rasa lelah yang beliau luangkan untuk membersamai penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih telah menemani penulis dari maba hingga akhir untuk berjuang bersama.
10. Sahabat tersayang penulis sejak masa SMP Nurlaila Nabiilah Majid Dan Achmad Adip Daruqudni, atas semua semangat dan dorongan yang diberikan pada penulis. Terima kasih karena tetap bertingkah seperti remaja 13 tahun, sehingga penulis selalu bisa merasa pulang dan memiliki rumah yang utuh. Terima kasih untuk 10 tahun pertemanan yang penuh perjuangan ini.
11. Sahabat di bangku SMA Penulis yaitu Devina, Sherin, Galih, Dan Raihan yang selalu mendukung dan merayakan semua pencapaian penulis selama ini. Terima kasih untuk segala usaha yang diluangkan untuk menyemangati penulis sejak dulu.
12. Teman-teman masa perkuliahan penulis dari awal maba hingga akhir, Dear Lova, Riris, Yunita, Velysa, Biyu, Wisnu, Dan Fahmi. Terima kasih untuk semua kebersamaan dengan penuh perjuangan selama ini. Terima kasih teman-teman karena selalu ada dan tidak pernah merasa harus bersaing. Terima kasih atas segala ketulusan kalian sehingga masa perkuliahan ini terasa sangat menyenangkan bagi penulis.
13. Farhani Nurva Budiarti dan Nafisatul Nur Ismawati selaku sahabat terkasih penulis sejak di bangku SMP yang tidak pernah berubah sedikitpun. Terima kasih untuk segala usaha membersamai penulis di masa-masa sulit. Terima

kasih banyak sudah siap siaga menjadi sosok pendengar yang sangat berarti di saat dunia penulis runtuh dan hancur. Terima kasih untuk ribuan kata penenang, semangat, dan doa yang telah dilimpahkan sejak dulu.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi ilmiah di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 10 Juni 2025

Penyusun,

Putri Ayu Pratna Paramita

NIM 210910302127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	
1.4.2 Manfaat Praktis.....	
Bab 2. Tinjauan Pustaka	6
2.1 Kerangka Konseptual	6
2.2 Konsep Ruang Publik	6
2.3 Fungsi Alun-Alun	7
2.4 Pedagang Kaki Lima	8
2.5 Kebijakan Revitalisasi	9
2.6 Teori Resistensi	10
2.6.1 <i>Hidden Transcript</i>	10
2.6.2 <i>Public Transcript</i>	11
2.7 Penelitian Terdahulu	11
Bab 3. Metodologi Penelitian	14
3.1 Pendekatan Penelitian	14
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	14
3.3 Informan Penelitian	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	17
3.5 Uji Keabsahan Data	18

3.6 Teknik Analisis Data	19
Bab 4. Hasil Dan Pembahasan	20
4.1 Lokasi Penelitian	20
4.2 Kebijakan Revitalisasi	22
4.3 Dinamika Pedagang Kaki Lima	25
4.4 Bentuk Perlawanan Pedagang Kaki Lima	31
4.4.1 Perlawanan Politik	32
4.4.2 Manuver Dagang	33
4.4.3 Bertahan Dalam Tekanan	35
4.4.4 Menjaga Relasi Kondusif dengan Aparat	38
4.5 Perlawanan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif James C.Scott ..	39
Bab 5. Penutup	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
Daftar Pustaka	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	15
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian**
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian**
- Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal**
- Lampiran 5. Transkrip Wawancara**
- Lampiran 6. Rekaman Wawancara**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alun-alun merupakan suatu ruang terbuka yang dapat digunakan secara umum oleh berbagai kalangan masyarakat. Alun-alun dapat dikategorikan sebagai ruang publik, karena sesuai dengan peruntukannya yang mana bertujuan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Alun-alun pada kebanyakan daerah, selalu berlokasi di pusat kota atau *central square*. Menurut Scurton (1984) ruang publik mempunyai makna sebagai sebuah lokasi yang dirancang sedemikian rupa agar dapat memiliki akses yang besar dan mudah, yang berguna sebagai tempat bertemunya pengakses ruang publik/masyarakat dengan norma yang sedang berlaku di wilayah tersebut. Mengacu dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa alasan alun-alun dibangun di tengah kota yakni untuk mempermudah akses masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas di alun-alun. Pada umumnya, makna alun-alun selalu beriringan dengan kekuasaan. Hal tersebut karena lokasi alun-alun tidak jarang selalu berdampingan atau mengelilingi bangunan penting di wilayah tersebut seperti rumah dinas bupati, tempat keraton, bahkan masjid agung (Haiu, 2022).

Sejarah alun-alun di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya Jawa. Dalam sistem tata kota tradisional Jawa, alun-alun merupakan bagian yang sangat penting karena melambangkan pusat dari kehidupan kota. Alun-alun sering kali dikelilingi oleh simbol-simbol kekuasaan seperti keraton, masjid, dan kantor pemerintahan. Dalam kebudayaan Jawa, alun-alun berfungsi sebagai tempat musyawarah rakyat, pelaksanaan upacara, pertunjukan wayang, hingga pasar rakyat. Artinya, sejak awal kemunculannya, alun-alun telah menjadi ruang publik yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sarat akan makna simbolik dan sosial. Alun-alun menjadi titik temu antara rakyat dan penguasa, antara sakral dan profan, antara ekonomi dan budaya. Keberadaan alun-alun mencerminkan keterbukaan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya secara aktif. Oleh karena itu, fungsi alun-alun sebagai ruang publik tidak hanya

dilihat dari segi fungsionalitas fisiknya, tetapi juga dari bagaimana ia menjadi wadah ekspresi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara luas (Miranto, 2016).

Fungsi dari keberadaan alun-alun sendiri oleh masyarakat adalah sebagai lapangan formal yang multifungsi. Masyarakat biasa menggunakan alun-alun untuk berolahraga, berkumpul, juga berdagang. Saat ini keberadaan alun-alun tidak jauh beda dengan pasar. Dipenuhi ratusan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Digital, 2023). Penggunaan alun-alun sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat. Bahkan kini jika alun-alun tanpa pedagang kaki lima seperti ada yang kurang dan lengkap. Pedagang kaki lima secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar dengan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Tentu saja hal ini karena pedagang kaki lima dapat menarik minat pengunjung ke alun-alun yang berpotensi untuk meningkatkan penjualan produk maupun jasa dari pedagang yang ada pada area tersebut (Maharani, 2023).

Kota Jember adalah salah satu kota yang berada di Jawa bagian timur yang mulanya dibentuk oleh kolonial belanda. Seperti halnya dengan kota lainnya di Jawa, Jember juga mempunyai alun-alun kotanya sebagai salah satu ciri khas dan identitas kota. Alun-alun Jember yang kira-kira dengan luas 7 ha ini tentu saja dihuni oleh berbagai kalangan dengan kepentingan dan aktivitas yang berbeda-beda. Keberadaan Alun-alun di Kota Jember cukup penting dan berpengaruh bagi kegiatan masyarakat. Perputaran aktivitas selama satu hari tersebut menjadikan area alun-alun secara tidak langsung dianggap sebagai tempat yang cukup penting. Pedagang kaki lima tidak mungkin melewatkan kesempatan tersebut. Namun meskipun begitu, di sisi lain penumpukan pedagang kaki lima tanpa pengelolaan yang baik juga dapat menimbulkan masalah kebersihan (Mufira & Aisah, 2024).

Alih-alih adanya kabar mengenai pengelolaan pedagang kaki lima, masyarakat cukup dikejutkan dengan adanya kabar revitalisasi/perbaikan alun-alun. Rencana tersebut memang sudah terdengar secara sekilas oleh masyarakat Jember,

namun dengan fakta bahwa tidak ada kesiapan apa pun dari pemerintah cukup membuat masyarakat berat hati. Menurut data dari Satuan Polisi Pamong Praja Jember, kurang lebih ada 250 pedagang kaki lima yang berjualan di area alun-alun (Septiawan & Ubaidillah, 2024). Rencananya saat masa perbaikan ini, para pedagang kaki lima akan direlokasi di sepanjang jalan RA Kartini. Relokasi tersebut tentu saja membuat masyarakat tidak habis pikir. Dalam kasus ini tentu saja banyak pedagang kaki lima dan umkm yang dirugikan sebab harus mengatur ulang konsumennya ke tempat relokasi tiap pedagang. Pasalnya juga, Jalan Kartini tersebut merupakan kawasan sekolah dengan akses jalanan yang satu arah. Jika sekitar 250 pedagang kaki lima direlokasi ke area Jalan Kartini, jalanan tersebut akan menjadi sangat padat dan tidak nyaman untuk pengendara maupun yang lainnya.

Berdasarkan kebijakan pemerintah revitalisasi Alun-alun Jember akan dimulai pertanggal 3 Juni 2024 yang rencananya akan rampung di bulan Oktober 2024 (Digital, 2024). Revitalisasi alun-alun yang dilakukan oleh pemerintah rencananya akan menelan anggaran sebesar Rp 26 miliar. Dengan anggaran yang cukup besar tersebut membuat masyarakat berat hati. Dampak dari revitalisasi Alun-alun Jember yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM juga masyarakat Jember yang biasa melakukan kegiatan pada area Alun-alun Jember. Pada realita di lapangan, yang terjadi terhadap relokasi pedagang kaki lima berjalan berbeda dari rencana awal. Relokasi gagal berjalan sesuai harapan karena Jalan Kartini kewalahan untuk menampung 250 pedagang kaki lima. Para pelaku pedagang kaki lima akhirnya melakukan relokasi mandiri secara memencar. Jalan Trunojoyo dan Sultan Agung menjadi salah satu jalan yang dituju oleh para pedagang kaki lima. Jalan tersebut memang cukup strategis dan ramai kehidupan karena berada pada tengah kota yang dipenuhi dengan pertokoan. Semenjak melakukan relokasi mandiri pun setiap malam jalanan tersebut selalu ramai dengan peminat. Inovasi dari pedagang kaki lima pun terus bertambah sehingga peminat makin banyak dan jalanan semakin padat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kembali resah, pasalnya jalanan menjadi terlalu padat dan sesak.

Hal ini dilakukan para pelaku pedagang kaki lima sebagai upaya perlawanan atau resistensi terhadap kebijakan revitalisasi. Dalam melakukan upaya penolakan revitalisasi tersebut, pedagang kaki lima bersama kawan-kawan aliansi lainnya menghadapi dinamika tersendiri dalam melakukan perlawanan. Pergolakan juga tekanan yang dialami oleh pedagang kaki lima rentan sekali terjadi, dari tekanan ekonomi sampai ke ranah politik. Sehingga seringkali perseteruan hingga konflik terjadi di antara pedagang kaki lima. Proses perlawanan yang memakan tenaga serta biaya ini juga menjadi hal yang penting bagi para pedagang kaki lima beserta kawan-kawan paguyubannya. Sehingga selagi menyusun strategi perlawanan lain sebagai bentuk jaga-jaga, para pedagang kaki lima juga tetap aktif berjualan di lokasi-lokasi tertentu tetap menghasilkan pundi-pundi penghasilan untuk bertahan hidup.

Berdasarkan beberapa penelitian lainnya mengenai perlawanan atau resistensi kebanyakan belum membahas bentuk perlawanan dingin seperti yang dilakukan di Alun-alun Jember. Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi Alun-Alun Gresik menjabarkan bahwa sejumlah perseteruan, beda pemahaman, hingga disintegrasi terjadi. Akhirnya muncul dinamika yang lebih besar yang mengharuskan pedagang kaki lima memecah pikiran mereka dengan mempertahankan kebulatan mereka untuk tetap melakukan perlawanan. Perlawanan berlangsung selama dua tahun dengan melibatkan demonstrasi dan istighosah bersama (Qomariyah, 2019). Pada penelitian lain dijelaskan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di wilayah sepanjang Jalan Colombo Yogyakarta, mengungkap bahwa perlawanan pada saat itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan negosiasi langsung dengan para petugas (Novita, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mirdalina (2016), membahas mengenai Resistensi Secara Terbuka Oleh Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Satpol Pp Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, yang mana peraturan tersebut sudah ada sebelumnya namun para pedagang kaki lima memilih untuk tetap berjualan dengan strategi “kucing-kucingan”.

Dilihat dari problem dan dinamika yang ada di lapangan terkait dengan perlawanan dari pedagang kaki lima, peneliti memiliki fokus untuk mengungkap bentuk-bentuk perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember sebagai upaya mempertahankan posisi serta identitas sosial mereka. Dalam konteks pedagang kaki lima di Alun-alun Jember, resistensi atau perlawanan dari mereka terhadap kebijakan revitalisasi dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan ekonomi dan identitas sosial mereka di ruang publik. Dengan menggunakan “senjata kaum lemah”, para pedagang kaki lima terus-menerus menunjukkan bentuk resistensi terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan. Penelitian ini ingin menyoroti tentang bagaimana bentuk-bentuk resistensi Scott tercermin dalam berbagai aksi mereka, serta bagaimana bentuk perlawanan ini menjadi cara yang efektif bagi mereka untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka di bawah tekanan kebijakan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang mengenai masalah penelitian tersebut, makna peneliti memilih merumuskan masalah penelitian ini adalah “bagaimana bentuk perlawanan pedagang kaki lima dalam menghadapi revitalisasi Alun-alun Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipilih oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menjabarkan bentuk perlawanan pedagang kaki lima dalam menghadapi revitalisasi Alun-alun Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat bagi peneliti maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengacu pada konsep "*senjata orang-orang lemah*" (*weapons of the weak*) dari James C. Scott. Melalui perspektif ini, penelitian memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmu sosiologi khususnya yang

berkaitan dengan teori resistensi, politik kelas bawah, dan dinamika kekuasaan dalam ruang publik. Pendekatan Scott membantu menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi yang dilakukan oleh PKL terhadap kebijakan pemerintah, terutama ketika mereka berada dalam posisi yang secara struktural lemah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- Pemerintah daerah, khususnya Pemkab Jember, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan ruang publik yang inklusif dan partisipatif.
- Satpol PP dan aparat penegak perda, sebagai refleksi dalam pendekatan penertiban yang humanis.
- Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Jember (PPKL-AAJ), sebagai penguat solidaritas dan advokasi dalam menghadapi tantangan kebijakan.
- Peneliti berikutnya, sebagai referensi pengembangan studi tentang resistensi masyarakat marginal dan dinamika ruang publik kota.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kerangka konseptual sekaligus kerangka berpikir yang akan penulis gunakan sebagai pedoman dalam melihat dan menganalisis data yang ditemukan di tempat penelitian. Kerangka konseptual yang akan penulis gunakan yaitu: (1) konsep ruang publik (2) fungsi alun-alun (3) pedagang kaki lima (4) kebijakan revitalisasi (5) teori resistensi & (6) penelitian terdahulu.

2.2 Konsep Ruang Publik

Konsep *public space* menurut Carr et al (1992) menggambarkan ruang publik sebagai tempat yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya. Bagi Carr (1992) ruang publik bukan hanya sebatas ruang fisik seperti taman, jalan, atau alun-alun, tetapi juga bagaimana ruang itu digunakan dan dimaknai oleh masyarakat. Ruang publik yang ideal adalah tempat di mana orang merasa nyaman, bebas, dan memiliki koneksi dengan orang lain maupun lingkungannya. Kenyamanan menjadi elemen penting dalam ruang publik. Carr (1992) menekankan bahwa ruang ini harus aman, bersih, dan mudah diakses. Orang-orang harus merasa nyaman untuk berada di sana, baik secara fisik seperti adanya tempat duduk yang memadai maupun psikologis, di mana mereka tidak merasa terancam atau dikucilkan. Lebih dari itu, ruang publik juga harus mampu memberikan suasana tenang. Ruang ini seharusnya menjadi tempat untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari, menawarkan ketenangan dengan suasana yang menyenangkan, hijau, dan estetik.

Namun, yang membuat ruang publik benar-benar hidup adalah koneksi sosial yang tercipta di dalamnya. Carr (1992) juga melihat ruang publik sebagai panggung tempat interaksi sosial terjadi. Di sini, orang dapat saling bertemu, berbagi cerita, atau sekadar menikmati kehadiran orang lain di sekitar mereka. Ruang publik yang baik akan menciptakan rasa kebersamaan, di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai. Selain itu, Carr (1992) juga menekankan

pentingnya inklusivitas. Ruang publik harus menjadi milik bersama, di mana semua orang—tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang—dapat merasa memiliki dan menggunakannya. Ruang ini juga harus fleksibel, mampu menampung berbagai aktivitas, dari aktivitas sederhana seperti duduk dan berbincang hingga acara komunitas yang melibatkan banyak orang. Bagi Carr (1992) ruang publik yang ideal adalah cerminan nilai-nilai masyarakat. Ia tidak hanya menjadi tempat untuk menjalani rutinitas, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, interaksi, dan kehidupan sosial yang harmonis. Ruang publik yang baik tidak hanya dirancang untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan dan dihidupi oleh masyarakat yang ada di sekitarnya (Carr et al., 1992).

2.3 Fungsi Alun-alun

Alun-alun memiliki peranan yang cukup penting sebagai sebuah ruang publik, yang mana alun-alun sendiri mendukung fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai ruang publik, alun-alun menjadi tempat berkumpul bagi berbagai kalangan masyarakat. Alun-alun merupakan tempat yang cukup strategis bagi masyarakat untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, dan mempererat hubungan sosial. Ruang publik seperti alun-alun dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan norma sosial yang berlaku dan mendorong interaksi yang harmonis di antara individu (Scurton, 1984).

Alun-alun selain fungsinya yang sangat berkontribusi pada aspek-aspek sosial, namun juga memiliki fungsi lebih dalam pada perputaran roda ekonomi. Adanya pedagang kaki lima di sekitaran alun-alun menciptakan peluang ekonomi lokal yang signifikan. Pedagang kaki lima tidak hanya menyediakan berbagai pilihan barang dan jasa bagi pengunjung, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Pedagang kaki lima yang beroperasi di sekitaran dapat menjadi daya tarik bagi para pengunjung, meningkatkan aktivitas perdagangan lokal, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang baik (Maharani, 2023).

Alun-alun adalah ruang publik yang sangat penting bagi masyarakat. Di sini, orang-orang dapat mengekspresikan diri dan memenuhi kebutuhan emosional

mereka. Alun-alun sering kali menjadi tempat berkumpul untuk berbagai kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial, serta berfungsi sebagai ikon kota. Dengan adanya alun-alun, masyarakat diharapkan memiliki tempat untuk menyampaikan harapan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, dengan suasana yang nyaman, aman, bersih, dan terawat. Bagian ini menekankan bahwa alun-alun berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat, yang menghubungkan tradisi, budaya, dan kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi pada penyediaan kebutuhan sosial dan ekonomi di suatu daerah (Hilman et al., 2018).

2.4 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah individu atau kelompok yang menjual barang dan makanan di ruang publik, seperti alun-alun, trotoar, atau daerah keramaian lainnya. Adanya pedagang kaki lima sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena mereka berkontribusi pada aktivitas ekonomi lokal dan memberikan pilihan bagi konsumen. Pedagang kaki lima dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar alun-alun dengan menarik minat banyak pengunjung. Hal ini berpotensi meningkatkan penjualan, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar (Maharani, 2023). Selain itu, pedagang kaki lima menciptakan banyak sekali lapangan kerja bagi banyak orang yang bergantung pada pendapatan dari berjualan di area tersebut. Di alun-alun, pedagang kaki lima menciptakan suasana yang hidup dan ramai, yang menjadi bagian dari identitas sosial komunitas. Masyarakat sering kali menganggap alun-alun tanpa pedagang kaki lima terasa kurang lengkap, karena kehadiran mereka menambah kehidupan dan dinamika di ruang publik.

Istilah pedagang kaki lima ini disebut juga sebagai pedagang liar yang artinya adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan, emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan terbuka, ataupun tempat-tempat tidak resmi lainnya. Pedagang kaki lima ini pun kerapnya bersifat sementara dan tidak memiliki izin resmi. Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan beberapa konflik dalam permasalahan perkotaan. Hal ini karena pedagang kaki lima yang secara liar menggunakan fasilitas umum sebagai sarana berjualannya. Pedagang kaki lima

adalah bukti adanya bentuk kegiatan informal yang memanfaatkan lokasi strategis namun yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Pedagang kaki lima merupakan sekumpulan dengan modal yang relatif kecil yang sedang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang maupun jasa untuk bertahan hidup (Raditya et al., 2016).

2.5 Kebijakan Revitalisasi

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima (2016), adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Tiap-tiap organisasi, lembaga pemerintahan, atau bahkan perkumpulan dalam sektor terkecil sekalipun pasti memiliki kebijakan di dalamnya. Istilah kebijakan tidak dapat disama artikan dengan istilah hukum maupun peraturan. Hukum maupun peraturan memiliki sifat kaku dan harus dijalankan atau dipatuhi tanpa terkecuali. Sedangkan kebijakan lebih bersifat fleksibel dan terkesan memberikan ruang interpretasi.

Revitalisasi merupakan upaya untuk mengembalikan vitalitas dari suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, namun kemudian mengalami degradasi. Revitalisasi jika dilihat dari tingkatannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni mikro dan makro. Revitalisasi makro memiliki cakupan ruang lingkup hubungan antar manusia (*human relation*), sedangkan revitalisasi mikro mencakup aspek fisik yang bertujuan untuk merubah suatu kawasan agar fungsi dan manfaatnya dapat lebih terdefinisi (Nida, 2014). Berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 18/prt/m/2010 tentang pedoman revitalisasi kawasan pasal 1 ayat (1) : revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya” (Menteri Pekerjaan Umum, 2010).

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Secara umum, pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti mempermudah akses, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga

lingkungan, memberdayakan masyarakat, serta memastikan pemerataan dan keadilan. Untuk mencapai semua harapan ini, penting untuk menggabungkan semua aspek tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan (hasrullah, 2024).

2.6 Teori Resistensi

Teori resistensi dikemukakan oleh James C. Scott fokus pada cara-cara resistensi yang dilakukan oleh para kaum lemah terhadap kekuasaan yang dominan. Secara lebih spesifik, Scott menjabarkan terkait resistensi dari para kaum lemah dalam bukunya yang berjudul "*weapon of the weak*" tahun 1985. Buku tersebut berisikan tentang berbagai alat atau metode perlawanan yang digunakan oleh para kelompok subordinat (petani) untuk bertahan hidup dan melawan sistem yang menindas mereka (Scott, 1985). Scott (1985) menjelaskan dalam buku tersebut jika bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani adalah perlawanan tanpa kekerasan yang tidak terlihat seperti ancaman langsung, namun dapat berpengaruh secara signifikan dalam melemahkan para kelompok dominan. Sehingga, bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para petani tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk resistensi dari para kelompok subordinat terhadap dominasi penguasa.

Scott membagi resistensi menjadi 2 bentuk, yakni *public transcript* (resistensi terbuka) dan *hidden transcript* (resistensi tertutup). Kedua kategori resistensi tersebut oleh Scott dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial, dan budaya (Susilowati, 2018). Scott (1985) menjelaskan bahwa adanya resistensi dalam bentuk perlawanan ini muncul sebagai respon para kelompok subordinat terhadap ketidakadilan yang mereka alami dari para kelompok penguasa.

2.6.1 *Hidden Transcript*

Menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan tidak langsung atau tersembunyi yang dilakukan oleh para kelompok subordinat terhadap dominasi penguasa, tanpa ada tindakan yang berkonfrontasi secara langsung dengan penguasa, sehingga dapat terhindar dari resiko yang terjadi (Scott, 1985). Para

kelompok subordinat (petani) melakukan berbagai macam cara dalam upayanya melakukan bentuk resistensi secara tertutup. Sebagai contoh dari cara yang diambil oleh para petani tersebut di antaranya adalah sabotase, pencurian secara kecil-kecilan, memperlambat pekerjaan, penyebaran rumor tentang tuan tanah, dan sikap pura-pura tidak mengerti/tahu (scott, 1985). Metode atau cara yang diambil oleh para kelompok subordinat tersebut terkesan kurang berdampak signifikan kepada para penguasa jika dilihat secara sekilas. Namun pada realitanya, metode tersebut dapat berjalan dengan sangat efektif dan efisien untuk mengurangi pendapatan, kinerja sistem, serta citra dominasi dari para penguasa.

2.6.2 *Public Transcript*

Merupakan bentuk yang dapat diamati secara langsung dan melibatkan interaksi antara kelompok subordinat dan kelompok dominan. Bentuk yang dihasilkan dari adanya resistensi terbuka adalah transkrip publik, yang mana transkrip publik adalah representasi perilaku dan ucapan yang terlihat dalam interaksi langsung antara kelompok dominan dan subordinat (Scott, 1990). Transkrip publik tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya justru dapat dikatakan berbanding terbalik antara yang terlihat dengan makna dibalikinya. Transkrip publik sering digunakan oleh para kelompok subordinat sebagai metode untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan berlindung dari balasan para penguasa.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang berbagai bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan. Misalnya, penelitian oleh octaviani & Puspitasari (2022) yang berjudul **“Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima”** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur untuk melihat bagaimana pedagang kaki lima di berbagai daerah, seperti tulungagung, pasar tanah abang, dan tuah serumpun, ditata oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penataan yang diterapkan meliputi relokasi, pengendalian, dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan sosialisasi, bantuan modal, serta kerja sama dengan

investor agar pedagang kaki lima tetap bisa menjalankan usahanya secara lebih terstruktur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima dan dampaknya bagi pedagang. Namun, ada perbedaan utama, di mana penelitian ini lebih menyoroti upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana pedagang kaki lima melakukan resistensi terhadap kebijakan revitalisasi.

Penelitian lain oleh Tafonao et al (2024), berjudul **“Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Pada Pasar Beringin Kota Gunungsitoli)”** memberikan wawasan yang lebih spesifik mengenai bentuk perlawanan pedagang kaki lima. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bagaimana pedagang kaki lima di pasar beringin, kota gunungsitoli, melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang berupaya menertibkan dan merelokasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima menggunakan berbagai bentuk resistensi, baik secara terbuka maupun tertutup, seperti mengabaikan aturan relokasi, tetap berjualan di area yang dilarang, hingga melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah. Persamaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Namun, perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan kebijakan yang diteliti: penelitian tafonao dkk. Meneliti pedagang kaki lima di pasar beringin kota gunungsitoli, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pedagang kaki lima di Alun-alun Jember yang menghadapi kebijakan revitalisasi.

Selanjutnya, penelitian oleh Larasati et al (2021) berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)”** menambah sudut pandang lain dalam melihat hubungan antara pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima dengan berbagai strategi, baik melalui pendekatan persuasif

maupun tindakan represif. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti resistensi dari pedagang kaki lima, lemahnya pengawasan pemerintah, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan aturan tata kota. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas bagaimana pedagang kaki lima merespons kebijakan pemerintah dan bentuk resistensi yang mereka lakukan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian larasati lebih menyoroti proses implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada bentuk resistensi yang muncul sebagai akibat dari kebijakan revitalisasi Alun-Alun Jember.

Penelitian-penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bentuk perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka maupun tersembunyi, dengan motivasi utama untuk melindungi mata pencaharian mereka di tengah kebijakan yang dirasa tidak adil.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan persepsi manusia dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini berupaya menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu dengan cara yang lebih fleksibel dan terbuka, sering kali melalui interaksi langsung dengan partisipan atau subjek (Creswell, 2015). Creswell juga mengidentifikasi beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif, seperti studi kasus, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan teori naratif, yang masing-masing memiliki fokus dan teknik yang berbeda dalam proses penggalan data.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang memiliki tujuan mencari makna atau esensi dari suatu fenomena yang dialami oleh seorang individu (Creswell, 2015). Peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi cenderung menganggap setiap pengalaman yang dialami oleh manusia sebagai fenomena. Setiap peristiwa dapat dikategorikan sebagai fenomena, contoh dalam penelitian ini adalah bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap revitalisasi Alun-alun Jember. Peneliti mengumpulkan data dari fenomena tersebut, kemudian mendeskripsikan secara rinci tentang apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jl. RA Kartini Dan Jl. Sultan Agung Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan lokasi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada saat proses revitalisasi berlangsung. Jalan RA Kartini merupakan jalan yang ditentukan oleh pemerintah untuk gerakan relokasi pedagang kaki lima, sedangkan jalan Sultan Agung merupakan jalanan pusat kota yang ramai akan adanya kegiatan pedagang kaki lima di atas trotoar. Meskipun

pemerintah berupaya untuk menertibkan pedagang kaki lima, kawasan ini tetap saja menjadi pusat bergeraknya para pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun adanya ketentuan yang ditetapkan, pedagang kaki lima tetap berusaha mempertahankan keberadaan mereka di tengah ketatnya persaingan dan kebijakan. Dengan fokus pada kawasan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai ketahanan dinamika yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Pada penelitian ini, penulis telah melakukan observasi awal pada bulan September 2024.

3.3 Informan Penelitian

Sebelum menentukan informan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan informan sebelum memulai penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang mana berarti bahwa peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset dan fenomena dalam studi tersebut (Creswell, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih informan yang sesuai dengan isu dan topik penelitian. Fokus penelitian ini adalah para pedagang kaki lima di Alun-alun Jember, yang merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pemilihan informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Peran	Keterangan
1.	Bu susi	58	Ketua paguyuban pedagang kaki lima	Ketua paguyuban pedagang kaki lima Alun-alun Jember selama 4 tahun dan sudah berjualan selama 40 tahun

2.	Bu misradi	70	Pedagang kaki lima kopi keliling	Pedagang kaki lima kopi keliling yang terdampak dari revitalisasi Alun-alun Jember dan sudah berjualan selama 25 tahun
3.	Bu anggraeny	70	Pedagang kaki lima makanan dan minuman	Pedagang kaki lima yang terdampak dari revitalisasi Alun-alun Jember telah berjualan selama 20 tahun.
4.	Pak Andi	62	Aparat Satpol PP	Bertugas untuk patroli Alun-alun Jember
5.	Bu Tatik	60	Pedagang mainan anak anak	Pedagang kaki lima yang terdampak dari revitalisasi Alun-alun Jember telah berjualan selama 15 tahun.

Sumber: olah data penelitian 2025

Pemilihan informan ini telah berdasar pada pengalaman dan keterlibatannya dalam isu yang sedang penulis teliti, sehingga diharapkan dapat memberi pandangan yang lebih mendalam terkait perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima dengan adanya kebijakan revitalisasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terkait kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku “Penelitian Kualitatif & Desain Riset”, Creswell menggambarkan pengumpulan data sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan pertanyaan riset yang muncul (Creswell, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tiga teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi juga dapat disebut dengan pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi topik penelitian. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti akan berusaha untuk mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Menurut Creswell (2015) fenomenologi menyediakan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sebagaimana yang dialami oleh beberapa individu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti sebagai pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi mendalam kepada informan sebagai pedagang kaki lima dan terlibat dalam aktivitas informan. Dengan cara ini peneliti ikut seolah-olah dalam kegiatan informan saat berjualan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data yang diperoleh sehingga hasilnya lebih valid.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai serangkaian langkah dalam suatu prosedur penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan cara tanya jawab antar peneliti dan informan. Teknik ini bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang diteliti. Data yang diperoleh biasanya berupa pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, dan opini informan. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali lebih luas mengenai bentuk perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember yang berdampak terhadap perkembangan ekonominya. Wawancara ini

menjadi metode yang sangat penting, sebab peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami informan penelitian (Creswell, 2015).

c. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data melalui media yang tersimpan bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, audiovisual, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data dari dokumen ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang ada di penelitian. Dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bahan bukti telah dilakukannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima melalui foto, audio, maupun video (Creswell, 2015).

3.5 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa keabsahan data menjadi hal penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan fenomena yang diteliti. Untuk itu, peneliti melakukan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data lalu dibandingkan dengan data yang sudah diperoleh (Sugiyono, 2013). Terdapat tiga macam triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang sudah diperoleh dengan melakukan pengecekan ulang yang sudah diperoleh dari beberapa sumber seperti hasil observasi, wawancara, maupun dokumen lain yang sudah diperoleh (Sugiyono, 2013). Dilakukan dengan membandingkan informasi dari lima informan utama yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu ketua paguyuban (Bu Susi), pedagang kopi keliling (Bu Misradi), pedagang makanan dan minuman (Bu Anggraeny), pedagang mainan (Bu Tatik), serta aparat Satpol PP (Pak Andi). Perbedaan perspektif ini

memberikan gambaran yang berimbang antara pihak terdampak dan pihak pelaksana kebijakan.

2. Triangulasi teknik, yaitu uji kredibilitas data dengan mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Dalam teknik ini peneliti menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi kepada sumber yang sama untuk mendapatkan (Sugiyono, 2013). Diwujudkan dengan observasi langsung di kawasan Alun-Alun Jember dan Jalan Kartini, wawancara mendalam, serta dokumentasi foto saat proses revitalisasi dan aktivitas pedagang kaki lima berlangsung.
3. Triangulasi waktu, yaitu uji dalam triangulasi yang di dalamnya adalah pengecekan melalui teknik wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013). Dilakukan dengan mengulang pengamatan dan wawancara dalam beberapa waktu berbeda antara bulan Desember 2024 hingga Mei 2025, untuk melihat konsistensi informasi dan perubahan yang terjadi seiring perkembangan proses revitalisasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada metodologi penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Saleh, 2017) langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah pendekatan yang ada pada metode penelitian kualitatif dapat dijabarkan lebih jelas yaitu:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (Miles dan Huberman dalam Saleh, 2017).

- b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data yang ditemukan di lapangan selama penelitian. Mereduksi data berarti merangkum permasalahan, memilah, serta memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti (Miles dan Huberman Dalam Saleh, 2017).

c. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sudah direduksi sehingga memperoleh data yang semakin mudah dipahami. Penyajian ini biasa dalam bentuk teks yang bersifat naratif, yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk menyajikan data dengan teks dan mencantumkan gambar ataupun tabel-tabel untuk membantu pembaca dalam memahami konteks (Miles dan Huberman Dalam Saleh, 2017).

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menggambarkan suatu objek yang sebelumnya belum jelas sampai menjadi data yang secara jelas. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan berkali-kali untuk memastikan verifikasi data tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dengan pendekatan dari informan, sehingga penarikan kesimpulan bukan didasarkan pada sudut pandang peneliti (Miles dan Huberman Dalam Saleh, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti muncul sebagai seseorang yang ingin menggali informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk perlawanan para pedagang kaki lima terhadap revitalisasi Alun-Alun Jember. Melalui pendekatan fenomenologi dalam metode kualitatif, penelitian ini bertujuan mengungkap secara mendalam bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Alun-alun Jember terletak di pusat Kota Jember, tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Patrang, Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis karena dikelilingi oleh berbagai fasilitas penting, seperti Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Masjid Agung Al Baitul Amien yang menjadi tempat ibadah, serta pusat perbelanjaan dan pertokoan seperti Pasar Tanjung yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, Alun-alun Jember juga memiliki akses yang mudah ke berbagai moda transportasi umum, seperti Stasiun Kereta Api sehingga menjadikannya titik sentral masyarakat untuk berbagai keperluan.

Dalam kehidupan sehari-hari, Alun-alun Jember tidak hanya ruang kosong yang pasif akan aktivitas, namun juga menjadi ruang hidup dengan berbagai macam kegiatan yang saling berdampingan. Seperti misalnya masyarakat menggunakan area alun-alun ini untuk berolahraga karena juga disediakan lahan dan lapangannya berupa lapangan basket dan voli, beserta *jogging tracknya* yang biasanya ramai digemari saat pagi hari. Alun-alun Jember juga terkenal sering kali menjadi tempat perayaan festival budaya maupun keagamaan yang membuatnya lebih ramai daripada hari biasanya. Mengingat banyaknya aktivitas dan interaksi yang terjadi di alun-alun, semua kegiatan tersebut didampingi juga dengan adanya kegiatan berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pada konteks ini, kehadiran pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai bagian dari berbagai aktivitas dan dinamika yang terjadi di Alun-alun Jember. Aktivitas ekonomi ini sudah secara alamiah dan telah terjadi begitu lama sehingga mau tidak mau menyatu dengan ekosistem Alun-alun Jember.

Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berdagang di Alun-alun Jember terdiri dari berbagai jenis usaha seperti pedagang makanan dan minuman ringan, hiburan mainan untuk anak-anak, kopi keliling. Para pedagang kaki lima ini tersebar luas di Alun-alun Jember seperti di trotoar, tepi jalan, di jalur pedestrian,

di halaman Masjid Agung Al Baitul Amien masih ada beberapa. Namun mengingat banyaknya aktivitas yang terjadi di alun-alun, juga banyaknya pedagang kaki lima yang menjadikan alun-alun sebagai ladang nafkahnya, tentu saja jika terjadi dalam satu perputaran Alun-alun Jember tidak akan muat untuk menampung segala aktivitas tersebut dalam satu waktu. Seperti contoh pada pagi hari secara dinamis mengikuti aktivitas pagi, maka diisi oleh pedagang kaki lima yang berjualan makanan sarapan, siang hari diisi oleh pedagang kaki lima yang menjual jajanan ringan karena Alun-alun Jember juga dekat dengan sekolah, lalu sore hingga malam ramai diisi dengan pedagang kaki lima yang berdagang makanan berat dan kopi keliling yang mulai muncul di atas trotoar tidak lupa juga hiburan mainan anak-anak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa pedagang kaki lima menyatakan bahwa lokasi ini adalah sumber penghidupan utama mereka. Mereka menilai bahwa alun-alun memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan tempat lain karena aktivitas masyarakat yang tinggi dan mengingat lokasinya juga yang sangat strategis karena di sentral kota. Beberapa dari para pedagang kaki lima yang sudah berdagang di Alun-alun Jember ini pun rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, yang mana artinya para pedagang kaki lima menjadikan alun-alun sebagai ruang hidup mereka. Dengan memahami keterikatan antara pedagang kaki lima dan ruang alun-alun sebelum adanya perubahan tata kelola atau revitalisasi, kita dapat merasakan bagaimana berpengaruhnya alun-alun terhadap kehidupan mereka. Perubahan yang terjadi baik dalam bentuk perubahan tatanan maupun perubahan fisik alun-alun, menjadi titik yang penting bagi para pedagang kaki lima karena mempengaruhi pola aktivitas dan sumber pendapatannya.

Sesuai dengan konsep *public space* menurut Carr et al (1992) menggambarkan ruang publik sebagai tempat yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya. Bagi Carr (1992), ruang publik bukan hanya sebatas ruang fisik seperti taman, jalan, atau alun-alun, tetapi juga bagaimana ruang itu digunakan dan dimaknai oleh masyarakat.

Ruang publik yang ideal adalah tempat di mana orang merasa nyaman, bebas, dan memiliki koneksi dengan orang lain maupun lingkungannya.

Konsep ruang publik atau *public space* menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami dalam konteks ini. Alun-alun bukan hanya tanah dan ruang kosong milik negara, namun merupakan ruang sosial yang terbuka untuk berbagai kalangan melakukan aktivitas dan dimaknai secara kolektif oleh masyarakat yang menggunakannya. Dalam konsep ini pun, keberadaan pedagang kaki lima mencerminkan bagaimana ruang publik digunakan secara inklusif dan menjadi arena tawar menawar, antara kebutuhan akan keteraturan kota dan hak atas ruang untuk bertahan hidup.

4.2 Kebijakan Revitalisasi Alun-alun Jember

Kebijakan Revitalisasi Alun-alun Jember merupakan suatu program pemerintah daerah yang sejatinya mempunyai landasan regulatif yang cukup kuat. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (2015-2035), yang di dalamnya mengatur mengenai arah pembangunan wilayah, termasuk penataan ruang terbuka publik contohnya alun-alun. Dalam konteks revitalisasi, peraturan daerah ini memberikan validasi atas usaha pemerintah memperbaiki fungsi alun-alun sebagai ruang publik yang tertib dan estetik (Perda Kabupaten Jember, 2015). Selain itu juga, anggaran proyek sebesar Rp 26 miliar yang digunakan untuk revitalisasi merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mengatur mekanisme penggunaan APBD, sehingga kebijakan ini memiliki keabsahan anggaran secara administratif (Perda Kabupaten Jember, 2024)

Dalam implementasinya di lapangan, kebijakan ini menimbulkan beberapa perdebatan terutama karena lemahnya keterlibatan masyarakat terdampak contohnya para pedagang kaki lima. Padahal keberadaan dan aktivitas pedagang kaki lima juga diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan diperjelas dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

(Septiawan & Ubaidillah, 2024). Regulasi-regulasi tersebut menjelaskan pentingnya penataan yang tidak hanya mengutamakan ketertiban dan keindahan, namun juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pedagang kaki lima. Sayangnya dalam proyek ini para pedagang kaki lima tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi maupun penentuan lokasi untuk relokasi, seperti yang disampaikan oleh bu anggraeny bahwa pengumuman relokasi dan revitalisasi disampaikan secara mendadak.

dengernya dari bupati dadakan gaada edaran apa apa. Sekarang misalnya mau nurunkan listrik soalnya mau ditutup, kan listrik jadi satu sama pedagang kaki lima, baru tahu itu. Tiba-tiba sama satpol pp wes disuruh pindah besoknya (bu anggraeny, februari 2025)

Kutipan ini menunjukkan bagaimana ketidakterbukaan informasi dari pemerintah kepada para pedagang kaki lima menjadi bentuk dominasi kuasa atas kelompok subordinat. Meskipun para pedagang telah mendengar kabar revitalisasi sejak lama, namun tidak ada kejelasan waktu, dan keputusan pemindahan dilakukan secara mendadak. Hal ini membuat pedagang kaki lima tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan strategi adaptasi, baik secara ekonomi, logistik, maupun sosial. Dalam Teori James C. Scott, ini mencerminkan bentuk ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan warga kecil. Pedagang kaki lima berada dalam posisi pasif, bukan karena tidak mau melawan, tetapi karena ruang untuk bernegosiasi secara formal sangat terbatas. Tindakan diam mereka tetap mengikuti instruksi pemindahan meski tanpa persiapan yang layak, bukan berarti tunduk. Bentuk relokasi yang disiapkan oleh pemerintah pun tidak cukup untuk menampung semua pedagang kaki lima. Jalan Kartini yang ditunjuk sebagai lokasi relokasi, padahal lokasi tersebut dapat dinilai sebagai lokasi yang tidak strategis karena akses yang sempit, satu arah, dan kurangnya daya beli di daerah tersebut. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima yang memutuskan untuk melakukan relokasi mandiri ke lokasi-lokasi lain.

Menurut wawancara dengan Bu Susi ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jember, pemerintah juga tidak memberikan bantuan memadai selama masa revitalisasi tersebut, mengingat pendapatan pedagang kaki lima yang sedang

krisis. Bahkan untuk kebutuhan seperti listrik saja, pedagang kaki lima tetap harus keluar uang dan mengatur pemasangan dari awal saat relokasi dilakukan

kalau fasilitas lampu kita pasang sendiri... Saya yang anu apa...
Kemarin... Habis 7 apa 8 juta gitu...

terus orang-orang bayar sama saya gitu per lampu 3 ribu kalau 2
lampu 5 ribu.... Permalam.. Saya bayarnya pakai token tiap hari
beli... Barusan itu anaknya saya yang narik i setiap malam. (bu
susi, april 2025).

Dalam kondisi pasca revitalisasi, ketika posisi dagang mereka berubah dan tidak lagi berada di zona yang sama, tidak ada fasilitas listrik yang disediakan, sehingga para pedagang harus berinisiatif memasang lampu sendiri. Bu susi sebagai ketua paguyuban bahkan menanggung biaya awal pemasangan hingga mencapai 7–8 juta rupiah. Setelah itu, ia menarik iuran harian dari para pedagang sebesar Rp3.000–Rp5.000 per malam untuk biaya token listrik. Proses ini dijalankan secara mandiri, tanpa campur tangan pemerintah atau pihak pengelola alun-alun. Alih-alih melakukan protes atas minimnya fasilitas, pedagang kaki lima memilih jalan yang aman: bertahan, mengatur sendiri, dan tetap berjualan. Inilah bentuk resistensi kultural yang cerdas, seperti yang dipaparkan Scott (1990), resistensi yang tidak selalu dalam bentuk teriakan, tetapi juga dalam bentuk kesanggupan untuk tidak hilang dalam tekanan sistem.

Paguyuban pedagang kaki lima sebenarnya tetap aktif dan kooperatif dalam menjaga ketertiban selama ini. Namun pedagang kaki lima seringkali merasa bahwa mereka diabaikan keberadaannya oleh pemerintah. Salah satu puncak kekecewaan pedagang kaki lima adalah ketika JFC (Jember Fashion Carnival), di mana para pedagang kaki lima tidak diberi tempat yang jelas dan leluasa sedangkan UMKM dari luar lebih diutamakan pada saat itu. Pedagang kaki lima yang notabene adalah jantung ekonomi alun-alun malah harus dipindah ke pinggiran atau bahkan tidak berjualan sama sekali. Keadaan ini sangat memperkuat tanggapan bahwa kebijakan revitalisasi dibuat untuk kepentingan estetika dan golongan tertentu saja, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan revitalisasi ini menunjukkan adanya perbedaan pemikiran mengenai pembangunan kota dan realitas masyarakat kelas bawah. Alih-alih menjadi urgensi yang

melibatkan warga dan didiskusikan dengan baik, program ini justru berujung pada kesenjangan akses, serta peminggiran kelompok yang menghidupi ruang publik tersebut. Jika dirujuk lebih jauh lagi, pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, disebutkan bahwa revitalisasi seharusnya menjadi nilai sosial dan keberlanjutan bagi masyarakat yang hidup pada kawasan tersebut (Menteri Pekerjaan Umum, 2010). Artinya adalah revitalisasi seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan estetika ruang publik, namun juga memikirkan keberlangsungan mata pencaharian pedagang kaki lima. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan revitalisasi di Jember dengan prinsip-prinsip dalam regulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut cenderung mengabaikan kelompok rentan yang bertahan hidup di alun-alun.

4.3 Dinamika Pedagang Kaki Lima

Dinamika pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Jember mengalami berbagai tantangan seiring dengan kebijakan revitalisasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sebelum adanya revitalisasi, pedagang kaki lima bisa berjualan dengan lebih fleksibel meskipun sering kali harus menghadapi razia dari Satpol PP. Namun setelah proyek revitalisasi berjalan, mereka dihadapkan pada ketidakpastian mengenai nasib usaha mereka terutama karena keterbatasan ruang untuk berjualan dan aturan yang semakin ketat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pedagang kaki lima adalah keterbatasan informasi mengenai kebijakan relokasi. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan kejelasan terkait lokasi baru untuk berjualan, sehingga terpaksa berpindah-pindah tanpa kepastian tempat yang strategis. Selain itu, daya beli masyarakat di beberapa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan keramaian alun-alun sebelum revitalisasi, sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Pada saat relokasi pun hal yang sangat dipusingkan pedagang kaki lima adalah saat menyusun kembali penempatan gerobak dan aliran listrik.

sebenarnya sama saja... Cuma kan dari orang kantornya gak tahu ya, kan saya orang awam ya... Disuruh ke bawah ya ke bawah, ke atas ya ke atas... Capek.lanjutnya. (Bu Susi, April 2025)

Dengan menyebut dirinya "orang awam", Bu Susi menyiratkan bahwa ia tidak memiliki posisi atau hak untuk bersuara, padahal ia adalah ketua paguyuban yang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu. Kata “ke atas” dan “ke bawah” dalam kutipan tersebut tidak hanya merujuk pada arah fisik, melainkan lokasi yang secara konkret menjelaskan dinamika kebijakan pemindahan tempat pedagang kaki lima. “atas” yang dimaksud adalah area halaman sisi pinggir Alun-alun Jember yang secara historis telah digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan, sedangkan “bawah” merujuk pada wilayah pelataran Masjid Agung Al Baitul Amien dan sepanjang jalan sisi luar, tempat pedagang kaki lima kemudian diarahkan untuk berjualan ketika proses revitalisasi berlangsung. Perpindahan ini tidak terjadi satu kali, tetapi berulang-ulang, dan dilakukan tanpa kejelasan waktu maupun prosedur yang jelas. Hal ini menyebabkan kelelahan secara fisik dan psikis bagi para pedagang. Pasalnya setiap kali pemindahan pemerintah hanya mengutus Satpol PP dengan sangat mendadak, lalu seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal yang dirasakan pedagang kaki lima adalah mereka harus menggotong gerobaknya, menata ulang gerobak tiap penjual, memasang aliran listrik baru, dan menunggu pembeli hafal dan mengetahui lokasi barunya.

ya umkm yang banyak mbak... Pedagang kaki lima ya dipinggirkan.. Sak kerepe dewe wes mencar mau jualan dimana.. Yang utama yang nganu stand itu sudah.. Kalau umkm kan di kasih tempat.. Dikasih tenda.. Ya seperti kita kan ya di anak tirikan... Kita seumpama disuruh bayar ya pasti bayar mbak.. Cuma kan gak ada tawaran... Jadi gak bisa apa apa juga.. Bingung (bu susi, april 2025)

Pernyataan Bu Susi menggambarkan ketimpangan perlakuan antara pedagang kaki lima dan pelaku umkm lainnya, khususnya pada saat kegiatan besar seperti Jember Fashion Carnaval (JFC). Dalam praktiknya, UMKM kerap mendapatkan tempat khusus, fasilitas tenda, dan posisi strategis di arena utama, sementara pedagang kaki lima yang telah lama berjualan di kawasan alun-alun justru dipinggirkan dan dibiarkan mencar tanpa kepastian lokasi. Kata-kata “sak kerepe dewe wes mencar” menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi atau skema relokasi resmi bagi pedagang kaki lima saat festival besar berlangsung. Akibatnya,

para pedagang kaki lima terpaksa mencari tempat sendiri di lokasi-lokasi pinggiran atau luar area utama JFC. Hal ini mempertegas posisi subordinat pedagang kaki lima yang dipandang tidak resmi dan dianggap mengganggu estetika atau “kemewahan” acara formal seperti JFC. Ketimpangan tersebut semakin diperjelas ketika Bu Susi mengatakan, “kalau disuruh bayar ya pasti bayar... Cuma kan gak ada tawaran.” Artinya, pedagang kaki lima bersedia tunduk pada peraturan dan biaya yang berlaku jika diberi ruang yang layak, namun tidak pernah diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara adil. Hal ini mencerminkan bahwa dominasi kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk larangan atau pengusuran, tetapi juga melalui pengabaian sistematis terhadap kelompok tertentu.

Salah satu kelemahan utama dalam proses revitalisasi Alun-alun Jember adalah minimnya pelibatan pedagang kaki lima sebagai pihak yang terdampak langsung. Kebijakan relokasi dilakukan secara sepihak tanpa forum komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari aparat Satpol PP yang turut bertugas di lapangan, Pak Andi:

Sing jelas, sosialisasi kuwi kudu jelas saka awal. Ajak PKL ngobrol, ajak paguyuban e rembugan. Wong-wong kuwi ora sak kepale, ono sing manut, ono sing ndableg. Tapi nek diajak rembug, enek solusine. Terus yo disediani fasilitas. Pindah tempat ora mung disuruh pindah, tapi diparingi lampu, listrik, tenda, minimal keamanan. Baru PKL gelem nurut (Pak Andi, Juli 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif aparat sendiri, proses komunikasi antara pemerintah dan PKL masih lemah. Pemerintah cenderung membuat keputusan tanpa menyusun pendekatan partisipatif. Dalam pandangan Pak Andi, ajakan rembug atau musyawarah adalah kunci agar PKL mau mengikuti kebijakan. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, dan keamanan sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret, bukan sekadar perintah pemindahan. Dengan kata lain, resistensi PKL bukan sekadar bentuk pelanggaran aturan, tetapi lebih sebagai ekspresi dari ketidakterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.

tiba-tiba sama satpol pp wes disuruh pindah besoknya, akhirnya kita kerja sama bareng masjid wes biar pakai pelataran atas. (bu anggraeny, februari 2025).

Kutipan ini mengacu pada momen saat Alun-alun Jember mulai ditutup dengan pembatas menjelang proses revitalisasi. Para pedagang kaki lima, termasuk Bu Anggraeny, mengaku baru diberitahu oleh Satpol PP satu hari sebelum penutupan resmi dilakukan, tanpa adanya surat edaran atau pemberitahuan resmi sebelumnya. Pemindahan yang mendadak ini menunjukkan minimnya partisipasi pedagang kaki lima dalam kebijakan, serta dominasi kuasa pemerintah atas ruang publik. Namun, alih-alih melakukan penolakan terbuka, para pedagang kaki lima merespons secara adaptif dengan menjalin kerja sama dengan pihak Masjid Agung Al Baitul Amien untuk tetap dapat berjualan di pelataran atas. Kesepakatan ini disertai syarat dari pihak Masjid Agung Al Baitul Amien agar saling menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Dengan membangun jaringan dan bekerja sama, mereka tetap bisa beradaptasi dengan kebijakan yang tidak mendukung mereka sepenuhnya. Banyak pedagang kaki lima yang kecewa dengan pemerintah karena merasa tidak pernah benar-benar didengar. Mereka beberapa kali mencoba menarik perhatian pemerintah dengan mengadakan acara sholatat dan sengaja tutup lapak supaya kondisi mereka diperhatikan. Namun, setiap kali mengundang bupati, tidak pernah sekalipun datang.

Salah satu tokoh penting juga dalam dinamika pedagang kaki lima di Alun-alun Jember adalah Bu Susi, yang telah berjualan selama lebih dari empat dekade dan menjabat sebagai ketua paguyuban pedagang kaki lima. Ia menyebut dirinya sudah “*mbah-e alun-alun*” karena telah berdagang sejak masih kecil hingga kini memiliki lima cucu. Menurut beliau sebelum adanya revitalisasi pendapatan dari berjualan di alun-alun masih cukup stabil, tetapi selama proses revitalisasi berlangsung kondisi itu berubah drastis.

dari 100 ya paling dapetnya 25... Itupun 25 cengak-cenguk rasanya, (bu susi, april 2025).

haduh turun banget itu mbak! Aku banyak utang, aku gapunya utang bisa punya utang buat nomboki... Banyak yang sampai jual motor. (bu anggraeny, februari 2025)

Kedua kutipan di atas menggambarkan tekanan ekonomi akut yang dialami para pedagang kaki lima sebagai dampak langsung dari kebijakan revitalisasi Alun-alun

Jember. Pendapatan yang sebelumnya cukup untuk menopang kebutuhan harian, turun drastis hingga tinggal seperempatnya, sebagaimana diungkap Bu Susi. Ungkapan “25 cengak-cenguk rasanya” tidak hanya mencerminkan jumlah penghasilan yang menurun, tetapi juga menyiratkan kesulitan dan perjuangan berat untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Kondisi ini diperparah dalam pernyataan Bu Anggraeny, yang mengaku harus berhutang dan menjual aset pribadi seperti sepeda motor agar bisa tetap berjualan. Bahkan orang yang sebelumnya tidak pernah berhutang pun akhirnya terjatuh hutang karena tidak ada pilihan lain. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berdampak pada lokasi berjualan, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi rumah tangga pedagang kaki lima secara langsung dan mendalam.

iya sama, kan ketuanya ada 1 tapi paguyubannya dibagi jadi 3 kan ketua paguyubannya. Kopleng, mainan, makanan. Jadi naungan itu tetap satu, kalau dapat undangan ya datang. (bu anggraeny, februari 2025)

Kutipan ini menunjukkan bahwa meskipun pedagang kaki lima Alun-alun Jember terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu, kopleng (kopi keliling), mainan, dan makanan. Para pedagang kaki lima tetap berada di bawah satu struktur paguyuban besar. Struktur ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan penghubung informal antara pedagang kaki lima dan pemerintah, terutama ketika ada undangan atau kebijakan tertentu yang melibatkan mereka. Dalam konteks Teori James C. Scott, paguyuban ini menjadi ruang tumbuhnya resistensi diam-diam (*hidden transcript*) dan solidaritas internal. Melalui paguyuban, para pedagang kaki lima saling berbagi informasi, menyusun strategi bertahan, dan menjaga eksistensi kolektif mereka di tengah keterbatasan ruang dan ketidakadilan kebijakan. Struktur ini memperkuat posisi mereka secara sosial, meskipun secara formal tidak diakui penuh oleh negara.

Dalam kondisi seperti ini paguyuban pedagang kaki lima tetap berfungsi aktif. Meskipun tidak memiliki kekuatan formal dalam proses pengambilan kebijakan, Bu Susi mengaku kerap diundang dalam acara-acara yang melibatkan pemerintah daerah meskipun hanya sebagai pelengkap.

kalau ada acara itu biasanya cuma diundang... Kayak buat seminar, dikasih rombongan, terus ya dikasih uang bensin, uang makan...

pokoknya ya pedagang kaki lima sini itu tidak nuntut apa-apa... Pokok wes dikasih tempat, ya kita syukur alhamdulillah,(bu susi, april 2025).

Namun demikian, perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima masih dinilai belum maksimal. Bahkan dalam kegiatan besar seperti Jember Fashion Carnaval (JFC), pedagang kaki lima kerap dipinggirkan sementara UMKM difasilitasi penuh. Hal ini menimbulkan rasa kecewa, dan menjadi alasan mengapa banyak pedagang kaki lima sepakat tidak mendukung bupati sebelumnya. Bu susi menegaskan bahwa pedagang kaki lima tidak memiliki tuntutan berlebih kepada pemerintah. Mereka hanya berharap untuk tetap diberikan tempat untuk berjualan agar bisa bertahan hidup. Ia juga menyampaikan bahwa banyak pedagang kaki lima yang akhirnya gulung tikar karena tidak sanggup bertahan selama masa renovasi, sementara yang lain kini menjadi “liar” karena tidak masuk dalam paguyuban resmi.

Perlawanan ini mengandung banyak makna. Pedagang kaki lima tidak lagi hanya diam dalam ketidakpastian, mereka juga mencoba untuk menjaga eksistensi mereka dengan mencari tempat berjualan yang baru tanpa harus berurusan langsung dengan pemerintah. Hal ini merupakan bentuk perlawanan yang lebih tersembunyi lagi, di mana para pedagang kaki lima memilih untuk segera mengurus dengan pihak pengurus Masjid Agung Al Baitul Amien agar tetap bisa berjualan dengan menggunakan pelataran dan aliran lampunya tanpa harus melawan secara terang-terangan. Namun tetap saja meskipun sudah berusaha dan beradaptasi secara diam-diam, perasaan kecewa dan kesal pastilah tetap ada dan sudah menumpuk cukup dalam. Mereka berpikir tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka yang stabil tiba-tiba diguncang oleh berbagai kebijakan. Salah satu bentuk perlawanan yang menurut mereka lebih halus yaitu dengan memilih untuk tidak mendukung kembali bupati menjabat dalam pemilihan kemarin, karena dinilai tidak peduli dengan nasib mereka. Mungkin ini terlihat sebagai strategi dan keputusan politik biasa, tapi sesungguhnya hal ini merupakan resistensi atau perlawanan yang penuh makna tanpa harus berhadapan langsung dengan pemerintah.

4.4 Bentuk Perlawanan Pedagang Kaki Lima

Situasi yang sedang dialami oleh para pedagang kaki lima di Alun-Alun Jember setelah adanya kebijakan revitalisasi yaitu tetap berupaya memutar otak dalam posisi yang serba terbatas. Dalam situasi tersebut, para pedagang kaki lima tidak hanya berusaha untuk bertahan secara ekonomi, namun juga memunculkan beberapa bentuk perlawanan atas perubahan yang mempengaruhi ruang hidup mereka. Para pedagang kaki lima tidak berpikir untuk melakukan penolakan secara gamblang karena akan merugikan posisi mereka juga pada akhirnya. Tindakan yang diambil yaitu sikap tetap menjaga keberadaan mereka dalam Alun-alun Jember yang telah sejak dulu mereka tempati untuk menjadi ruang hidupnya. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan tenang tanpa adanya konfrontasi secara langsung, namun cukup untuk menyuarakan penolakan mereka pada keadaan saat ini. Dengan cara yang mereka pilih, para pedagang kaki lima mencoba mengarahkan tekanan kebijakan dengan tetap berjualan, berpindah lokasi secara mandiri, ataupun melakukan sikap tertentu yang mencerminkan kekecewaan kolektif. Dalam diamnya pun mereka berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya serta ikatan sosial yang selama ini telah tumbuh pada ruang tersebut. Dalam konsep *hidden transcript* oleh James C. Scott, bentuk perlawanan tidak selalu dilakukan secara terbuka melalui demonstrasi atau penolakan keras, melainkan melalui cara-cara halus seperti menolak patuh, menghindar, dan tetap menjalankan aktivitas sembari menyesuaikan kondisi. Hal ini tampak dari wawancara dengan aparat Satpol PP yang menyebut bahwa meskipun sudah ditertibkan, para pedagang tetap kembali berdagang pada malam hari secara diam-diam:

Walah, sedih, mbak! Akeh pedagang bingung. Ana sing nggrundel, ana sing nangis. Tapi Satpol yo mung nurut instruksi. aku karo kanca-kanca ngupaya nganggo cara alus. Ora langsung dibubarke. Tak ajak rembugan. ‘Bu, Pak, nek iso monggo pindah sek, kene wis ora oleh.’ tapi yo ngono, ora kabeh gelem langsung nurut. Ana sing balik maneh bengi-bengi, dodolan nyamar, lapak cilik, cepet-cepet siap kabur.. (Pak Andi, Juli 2025)

Meski secara formal mereka telah dilarang untuk berjualan di area tersebut, sebagian besar dari mereka tetap mencari celah untuk mempertahankan mata

pencahariannya. Tindakan seperti kembali berdagang secara diam-diam di malam hari, menggunakan lapak kecil yang mudah dibongkar, dan bersiap melarikan diri saat ada patroli, merupakan bentuk resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima pada saat itu.

4.4.1 Perlawanan Politik

Resistensi politik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Alun-alun Jember muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Bu anggraeny, salah seorang pedagang kaki lima yang telah berjualan di Alun-alun Jember sejak lama, menyampaikan perasaan kecewanya terhadap kebijakan tersebut, dan menjelaskan alasan di balik keputusan kolektif para pedagang kaki lima untuk tidak memilih bupati yang sedang menjabat:

ya kita mau demo ya apa mbak... Males kan mbak sudah tua rata-rata, ya sudah sepakat tidak usah dipilih lagi saja jalan pintas kita.
(bu anggraeny, februari 2025)

Salah satu bentuk nyata dari resistensi ini adalah keputusan kolektif untuk tidak memilih kembali bupati menjabat dalam pemilihan bupati terakhir. Keputusan ini diambil bukan hanya sebagai ekspresi kekecewaan pribadi, tetapi juga sebagai strategi kolektif untuk menunjukkan bahwa suara pedagang kaki lima memiliki dampak politik yang signifikan.

Para pedagang kaki lima sebelumnya merasa diabaikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan penataan ulang alun-alun. Mereka menganggap bahwa selama kepemimpinan kemarin, pedagang kaki lima sering kali dianaktirikan dibandingkan dengan pelaku usaha lain seperti UMKM yang lebih mendapat perhatian dan fasilitas. Puncaknya terjadi saat acara besar seperti Jember Fashion Carnival (JFC), di mana pedagang kaki lima disingkirkan dari alun-alun dan tempat mereka diisi oleh pelaku UMKM dari luar. Tanpa melakukan demonstrasi besar-besaran atau aksi protes yang konfrontatif, pedagang kaki lima memilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk perlawanan. Mereka sepakat bahwa cara terbaik untuk menunjukkan ketidakpuasan adalah dengan memastikan bahwa pemimpin yang dianggap tidak berpihak kepada mereka tidak

lagi terpilih. Bagi pedagang kaki lima, ini adalah bentuk resistensi politik yang paling efektif dan berdampak langsung tanpa harus menghadapi risiko represi dari pemerintah atau aparat penegak hukum.

4.4.2 Manuver Dagang

Ketika kebijakan revitalisasi diterapkan tanpa adanya sosialisasi yang jelas, pedagang kaki lima dihadapkan pada situasi yang sulit. Mereka kehilangan tempat jualan, mengalami penurunan pendapatan, dan dihadapkan pada berbagai aturan baru yang membatasi cara mereka berjualan. Namun, alih-alih menyerah atau melakukan protes terbuka, mereka memilih untuk beradaptasi dan memodifikasi strategi jualan mereka agar tetap bisa bertahan. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah berpindah lokasi ke tempat yang masih memungkinkan untuk berjualan.

Beberapa pedagang PKL sempat mencoba mengikuti kebijakan relokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun lokasi yang ditentukan tidak memberikan prospek ekonomi yang menjanjikan. Dalam wawancara dengan Bu Tatik, pedagang mainan, ia mengaku sempat mencoba berdagang di lokasi relokasi di Jalan Kartini, namun akhirnya memilih kembali ke kawasan Alun-Alun karena minimnya pembeli:

Pernah. Coba jualan di Jalan Kartini. Tapi mbak... sepi banget. Gak ada anak-anak, cuma motor lewat, itu pun jarang. Saya coba tiga hari, rugi. Mainan saya gak laku. Akhirnya saya balik lagi ke sini, cari posisi yang aman. Saya lihat-lihat tempat yang agak pinggir, yang gak terlalu mencolok. (Bu Tatik, Maret 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bentuk resistensi pasif yang bersifat adaptif. Alih-alih melakukan penolakan terbuka, Bu Tatik memilih bertahan dengan strategi diam-diam, tetap berdagang di area Alun-alun, namun mencari posisi yang tidak mencolok dan meminimalisir risiko penertiban. Tindakan ini mencerminkan apa yang disebut James C. Scott sebagai *everyday forms of resistance*, di mana pihak yang secara struktural lemah menggunakan strategi keseharian untuk mempertahankan penghidupan tanpa harus melawan secara langsung.

Pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di tengah alun-alun beralih ke pelataran Masjid Agung Al Baitul Amien setelah berkoordinasi dengan pengurus masjid. Langkah ini bukan hanya sekadar mencari tempat baru, tetapi juga merupakan strategi untuk tetap berada di area yang strategis tanpa harus berbenturan langsung dengan kebijakan pemerintah. Langkah ini menunjukkan upaya bertahan dengan cara damai dan tidak konfrontatif, sembari tetap mencari ruang yang strategis. Selain lokasi, cara mereka berdagang juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya mereka dapat menggelar karpet dengan leluasa, kini aturan baru melarang hal tersebut. Alhasil, banyak pedagang kaki lima yang mengubah pola berdagang, dari menggunakan karpet ke gerobak, atau menjual dagangan dengan kemasan yang lebih praktis dan fleksibel. Inovasi ini penting agar mereka tetap dapat menarik perhatian pembeli dalam situasi yang lebih terbatas. Namun, perubahan ini tidak lepas dari dampak ekonomi yang signifikan. Omset mereka menurun drastis, sementara kebutuhan tetap berjalan. Beberapa bahkan harus menjual aset pribadi untuk bisa bertahan.

Dengan mengubah strategi jualan, menjalin kerja sama dengan lingkungan sekitar, serta tetap bertahan di tengah keterbatasan, pedagang kaki lima menunjukkan bahwa mereka bukan hanya korban dari kebijakan, tetapi juga aktor yang mampu menavigasi perubahan dengan kekuatan bertahan yang luar biasa. Walaupun begitu ada pedagang yang merespons tekanan kebijakan dengan bentuk resistensi pasif semata. Sebagian dari mereka juga mengembangkan strategi adaptif untuk mempertahankan penghasilan. Ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan, seperti saat hujan atau patroli rutin, pedagang mencoba mencari jalur alternatif. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Tatik, seorang pedagang mainan:

Alhamdulillah, cukup buat makan, bayar listrik, sekolah anak, ya seadanya. Tapi kalau lagi musim hujan atau patroli sering, ya sepi mbak. Kadang gak nutup modal. Untungnya ada anak saya yang bantuin online, jualan mainan lewat WA juga sekarang. Jadi saya gak cuma ngandelin lapak ini..

Iya, meskipun gak sepintar anak muda, saya belajar pelan-pelan. Anak saya yang fotoin mainan, terus sebar ke grup RT, PAUD, ibu-ibu sekitar. Jadi pas malam saya jualan langsung, siangya ada pesanan online. Tapi ya gitu, tetap saja yang paling ramai ya di

Alun-Alun, karena anak-anak bisa langsung pegang dan main (Bu Tatik, Maret 2025)

Kutipan ini menunjukkan bentuk adaptasi ekonomi yang dilakukan oleh PKL dengan memanfaatkan jaringan keluarga dan teknologi sederhana, seperti penjualan lewat *WhatsApp*. Meskipun mereka tetap menggantungkan sebagian besar pendapatan dari lapak fisik, kemampuan untuk beradaptasi secara digital merupakan bentuk inovasi mikro yang menunjukkan daya lenting ekonomi pedagang kecil dalam menghadapi ketidakpastian.

4.4.3 Bertahan Dalam Tekanan

Salah satu informan, Bu Misradi adalah seorang pedagang kopi yang sudah lama berjualan di kawasan sekitar Alun-alun Jember mengungkapkan bagaimana ia harus bertahan di tengah kondisi yang makin sulit. Pendapatannya jauh berkurang setelah relokasi, bahkan pernah hanya membawa pulang lima belas ribu rupiah setelah dipotong ongkos ojek. Ia mengatakan:

semalam dapet empat puluh, kasih ojek Rp25.000,00 ya tinggal Rp15.000,00. Gitu banget, yang nutup itu pedagang kopi, jadi kan tertutup, nggak kelihatan. Di sana udah gak boleh. (bu misradi, february 2025)

Kutipan ini menggambarkan tekanan ekonomi yang dialami pedagang kopi keliling setelah revitalisasi. Dari total pendapatan Rp 40.000, Bu Misradi hanya membawa pulang Rp 15.000 setelah dipotong ongkos ojek. Selain itu, ia juga menyebut bahwa posisinya kini semakin terpinggirkan dan tidak terlihat, karena lokasi strategis tempat biasanya berjualan telah dilarang dan dipenuhi pedagang lain yang “menutup” akses pandang. Selain itu, ucapan “di sana udah gak boleh” menandakan bahwa kebijakan pembatasan telah menghilangkan akses terhadap ruang-ruang publik yang sebelumnya digunakan secara tradisional oleh pedagang kaki lima. Dengan tetap hadir di ruang yang tersisa, Bu Misradi mempertahankan eksistensinya.

saya nyari tempat udah gak tau, sampai itu bank jatim... Duduk sama pedagang lain kok gak boleh. Di bank mandiri juga gitu. Sampai saya pindah-pindah terus, di masjid cuma dapat tempat sebentar. (bu misradi, february 2025)

Di tengah tekanan yang terus datang dari berbagai arah, Bu Misradi juga menceritakan bahwa proses relokasi berjalan sangat tidak jelas. Ia bahkan sempat kebingungan mencari tempat karena tidak ada satu pun yang bisa memberi kepastian. Lokasi-lokasi seperti sekitar Bank Jatim, Masjid Agung Jember, dan trotoar jalan sempat ia coba, tetapi kebanyakan tidak diizinkan oleh aparat atau lokasinya terlalu sempit untuk bisa bertahan lama.

itu bayar lima ribu buat uang lampu, tapi malemnya saya gak dapet uang. Saya bilang, oh kok bisa tetap dibayar... Akhirnya gak dapet apa-apa. (bu misradi, februari 2025).

Dalam kondisi seperti ini, ia harus membayar uang kebersihan atau uang lampu sebesar Rp. 5.000,00 walau kadang tak mendapat penghasilan sepeser pun. Ia bahkan sempat merasa aneh ketika tetap harus bayar meski tidak ada pemasukan.

kalau tempatnya sempit, ya saya gak dikasih. Tapi gak apa-apa, saya ngerti. Kadang bu petil (pedagang lain) kalau rame saya dikasih tempat, tapi kalau enggak ya saya gak ikut. (bu misradi, februari 2025)

Kondisi ini memaksanya untuk terus keliling mencari tempat yang bisa ditinggali untuk jualan, meskipun tidak semua lokasi mengizinkan atau bisa ia tempati. Kadang ia sempat numpang jualan di dekat pedagang lain, tapi jika terlalu sempit, ia lebih memilih untuk tidak menumpang dan menunggu kesempatan lain. Tak hanya itu, karena tidak punya kendaraan sendiri, Bu Misradi juga harus mengandalkan ojek untuk berangkat dan pulang. Ia biasanya diantar pukul 16.00 dan dijemput kembali malam hari. Ongkos ojek ini juga jadi pengeluaran tetap yang kadang justru lebih besar dari pendapatan harian. Meski berat, Bu Misradi mengaku tidak pernah protes atau melawan dengan cara terbuka. Ia memilih untuk diam dan menunggu keputusan dari pemerintah atau paguyuban. Bahkan ketika melihat kondisi yang semakin tidak berpihak, ia hanya bisa mengelus dada.

kalau sudah tua kayak saya, takut juga nak, takut gak cocok, gampang perasaan. Kalau gak cocok tempatnya, malah bingung sendiri. (Bu Misradi, Februari 2025)

Selain mengalami tekanan ekonomi, Bu Misradi juga merasa takut dengan usia dan kondisi tubuhnya yang tidak sekuat dulu. Ia takut kalau sewaktu-waktu

tempat jualannya tidak cocok atau tidak sesuai harapan, ia tidak sanggup lagi untuk berpindah-pindah seperti pedagang yang masih muda.

saya udah bilang ke bendahara, 'aku gak dapet tempat loh,' ya cuma ditinggal. Gak dipikirin. Padahal saya juga anggota. (Bu Misradi, Februari 2025)

Ketika ditanya soal keberadaan paguyuban kopi, bu misradi menjelaskan bahwa secara struktur memang ada ketua, wakil, dan bendahara. Namun, realitasnya, paguyuban kopi sudah tidak banyak membantu ketika kondisi di lapangan semakin sulit. Bahkan saat ia mengadu ke bendahara karena tidak mendapat tempat, ia tidak ditanggapi. Menurutnya, pada masa awal berdirinya paguyuban, para pedagang kaki lima masih sering dikumpulkan. Ada pembagian bantuan seperti tabung gas, gerobak, bahkan pernah ada pelatihan dan pertemuan resmi. Tapi belakangan ini semua itu berhenti. Ketika revitalisasi dimulai dan pedagang mulai mengalami kesulitan, tidak ada dukungan kolektif yang berarti dari paguyuban.

waktu puasa itu, buka puasa bareng. Kalau ada pelatihan, kita dikumpulkan. Tapi itu dulu jamannya bupati samsul, sekarang udah gak ada. (Bu Misradi, Februari 2025)

Bu Misradi juga mengungkapkan bahwa salah satu bentuk keteraturan dulu adalah pembagian seragam berdasarkan hari. Warna hijau dipakai hari Senin dan Selasa, cokelat untuk Rabu dan Kamis, serta batik untuk Jumat. Seragam ini bukan hanya identitas, tapi juga cara menjaga kekompakan. Saat Ramadhan, mereka juga mengadakan buka puasa bersama, dan ketika ada pelatihan atau pertemuan, mereka akan berkumpul di Kelurahan. Kenangan ini semakin terasa pahit ketika dibandingkan dengan kondisi sekarang, di mana paguyuban kopi keliling seperti jalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi kepedulian antar anggota atau upaya untuk menyuarkan nasib bersama. Apalagi, beberapa pedagang kaki lima bahkan harus menanggung beban pinjaman yang belum lunas, sementara dagangan mereka sudah habis.

Dalam kondisi seperti ini, solidaritas antar sesama pedagang kaki lima menjadi tumpuan terakhir. Jika ada pedagang yang laris atau punya tempat strategis,

kadang mereka berbagi tempat kepada Bu Misradi. Tapi jika tempat terlalu sempit, maka ia tidak ikut berjualan dan memilih menunggu hari lain. Sebelum revitalisasi, bu misradi mengaku bisa mengantongi penghasilan yang cukup besar saat malam minggu. Ia pernah mencapai Rp. 300.000,00 sampai Rp. 400.000,00 hanya dalam satu malam. Tapi sekarang, penghasilannya jauh dari cukup. Bahkan untuk bayar ojek saja harus dihitung-hitung dulu.

Semua pengalaman yang diceritakan Bu Misradi menunjukkan bahwa resistensi pedagang kaki lima tidak selalu berbentuk penolakan terbuka atau protes langsung. Ada bentuk perlawanan yang lebih sunyi, tapi tidak kalah kuat, yaitu bertahan di tengah kesulitan, sabar menghadapi ketidakpastian, dan tetap berjualan demi mempertahankan kehidupan. Strategi bertahan ini menjadi bentuk nyata dari apa yang disebut James C. Scott sebagai *“everyday resistance”*, di mana perjuangan dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh makna dan berulang setiap hari. Kebijakan revitalisasi alun-alun tidak hanya membuat pedagang kaki lima kehilangan tempat jualan, tetapi juga menyebabkan penurunan drastis dalam pendapatan mereka. Banyak dari mereka yang sebelumnya bisa hidup cukup stabil tiba-tiba harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang sulit. Beberapa bahkan terpaksa menjual aset pribadi seperti motor untuk bisa tetap menjalankan usaha mereka. Meskipun demikian, pedagang kaki lima tetap bertahan.

4.4.4 Menjaga Relasi Kondusif dengan Aparat

Sadar bahwa mereka berada dalam posisi yang rentan, pedagang kaki lima juga menerapkan strategi bertahan dengan cara menjaga hubungan baik dengan aparat yang bertugas di lapangan, terutama Satpol PO. Mereka menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan aparat hanya akan merugikan mereka, sehingga mereka memilih cara yang lebih halus untuk tetap bisa berjualan tanpa terlalu banyak hambatan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan perhatian kecil kepada aparat yang bertugas, seperti membelikan rokok untuk ketua tim Satpol PP. Meskipun bukan bentuk suap, tindakan ini lebih kepada upaya membangun hubungan baik agar mereka tidak terlalu ditekan ketika ada penertiban.

ya kadang-kadang kalau ada satpol pp lewat, kita kasih rokok sedikit, biar nggak terlalu ditekan. Gitu aja, nggak usah ribut, biar mereka nggak marah. (bu anggraeny, februari 2025)

Kutipan ini menggambarkan bagaimana Bu Anggraeny dan para pedagang kaki lima lainnya menjaga hubungan baik dengan aparat, meskipun mereka tidak bisa menghindari penertiban yang sering dilakukan oleh Satpol PP. Pedagang kaki lima juga sering kali menunjukkan sikap kooperatif dalam setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Mereka tidak serta-merta menolak aturan, tetapi lebih memilih untuk mencari celah agar tetap bisa berjualan tanpa melanggar aturan secara langsung. Pendekatan ini membuat mereka bisa bertahan lebih lama meskipun menghadapi berbagai kebijakan yang tidak selalu berpihak pada mereka. Secara keseluruhan, strategi menjaga hubungan dengan aparat ini menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang konfrontatif. Dengan membangun relasi yang baik, pedagang kaki lima bisa tetap bertahan dan menghindari represi yang lebih besar dari pihak berwenang.

4.5 Perlawanan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif James C. Scott

Berdasarkan perspektif yang dikemukakan oleh James C. Scott (1985), maka resistensi adalah perlawanan yang dilakukan oleh kelompok subordinat kepada penguasa. Resistensi sendiri dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *public transcript* dan *hidden transcript*. *Public transcript* menurut Scott merupakan representasi perilaku dan ucapan yang terlihat dalam interaksi langsung antara kelompok dominan dan subordinat (Scott, 1990). Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dalam penelitian ini, hampir tidak ditemukan adanya perlawanan terbuka dari pedagang kaki lima dalam bentuk *public transcript*. Dapat dipahami bahwa tidak adanya bentuk resistensi ini adalah sebagai bentuk was-was para pedagang kaki lima, seperti ancaman kehilangan lapak yang dapat merugikan mereka. Sementara itu, bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di Alun-alun Jember lebih dominan mengarah pada *hidden transcript*, yang artinya perlawanan tersembunyi dari kelompok subordinat terhadap kekuasaan yang dominan (Scott, 1990). *Hidden transcript* ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari atau yang disebut *everyday resistance*, tidak selalu terlihat oleh pihak dominan

atau yang berkuasa. Namun di balik itu semua, perlawanan yang dilakukan menyimpan banyak makna sosial dan politik yang kuat dalam mempertahankan eksistensi dan identitas kelompok yang dirugikan.

Perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima tidak dalam bentuk aksi yang terbuka secara terang-terangan, demonstrasi, atau penolakan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah. Pada sebaliknya, mereka memilih untuk bertahan dengan melakukan berbagai penyesuaian dengan cara yang lebih halus, misalnya seperti yang sudah dijabarkan di atas seperti keputusan untuk tidak memilih kembali bupati yang sedang menjabat dalam pemilihan terakhir adalah salah satu simbolik dari penolakan dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Secara struktural pemerintah telah menggeser keberadaan mereka dari ruang publik yang mereka jadikan sebagai ruang hidup selama ini. Hal ini selaras dengan pemikiran Scott, bahwa kaum subordinat tidak selalu diam ataupun tunduk, tetapi membangun ruang melawannya sendiri untuk menyampaikan kritik dan penolakan meskipun tidak secara langsung.

Bentuk-bentuk perlawanan pedagang kaki lima tersebut sangat melekat dari apa yang disebut Scott sebagai “senjata kaum lemah” yang artinya strategi resistensi oleh kelompok ini dalam bentuk yang tidak terlalu mencolok tetapi dilakukan setiap hari atau terus-menerus. Secara formal pedagang kaki lima memang tidak melakukan perlawanan secara langsung, tetapi bertahan meskipun tidak mendapat tempat strategis, sampai menanggung beban ekonomi yang berat tanpa menyerah adalah bagian dari resistensi yang mereka bangun dari kesehariannya. Para pedagang kaki lima saling berbagi tempat, saling mengingatkan jika ada patroli Satpol PP, ataupun sekadar memberi dukungan ketika penghasilan sedang turun drastis. Semua hal tersebut menjadi simbol resistensi tertutup yang tersembunyi namun kuat untuk mempertahankan hak mereka. Hal ini juga menjelaskan bahwa resistensi tidak harus hadir dalam bentuk konfrontasi langsung, namun juga bisa muncul dalam keberlanjutan hidup yang dijaga dengan berbagai cara yang fleksibel dan penuh energi.

Hidden transcript penting untuk dipahami bahwa bukan hanya sekadar bentuk ketidakpuasan yang pasif, melainkan mengandung potensi politik yang sangat kuat. Scott (1990) menyatakan bahwa dalam *hidden transcript* kelompok subordinat dapat membangun solidaritas, dan kesadaran bersama tentang apa yang mereka alami bersama. Dalam konteks ini, pedagang kaki lima Alun-alun Jember dibentuk melalui pengalaman bersama menghadapi relokasi sepihak, pembatasan ruang dagang, dan minimnya keterlibatan dalam proses kebijakan. Kisah-kisah ini dapat menjadi narasi bersama yang menonjolkan ikatan sosial mereka sebagai kelompok yang dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Scott, perlawanan pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi ini bukanlah hal kecil atau tidak berarti, namun adalah bentuk resistensi penuh strategi dan menjadi bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan ekonomi di tengah tekanan kebijakan yang merugikan.

Dalam situasi yang penuh tekanan akibat relokasi dan pembatasan ruang dagang, solidaritas antar sesama pedagang menjadi elemen utama yang menjaga keberlangsungan resistensi, meskipun tidak dilakukan secara terbuka. Seperti memberi tahu lokasi patroli Satpol PP, berbagi tempat berdagang di lokasi yang terbatas, atau sekadar memberikan dukungan moral saat penghasilan sedang menurun, menunjukkan adanya ikatan sosial yang kuat. Solidaritas ini menjadi ruang yang memungkinkan berkembangnya *hidden transcript*, karena melalui komunikasi yang intens dan rasa saling percaya, para pedagang kaki lima dapat menyuarakan keluh kesah, kritik terhadap kebijakan pemerintah, hingga menyusun strategi bertahan secara kolektif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Scott (1990) bahwa *hidden transcript* hanya bisa tumbuh dalam ruang sosial yang aman, di mana kelompok subordinat dapat berbagi pengalaman secara jujur tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, resistensi tidak hanya menjadi ekspresi individu, melainkan juga tumbuh dari kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar pengalaman bersama dan rasa senasib sepenanggungan. Oleh karena itu, solidaritas antar pedagang tidak hanya berfungsi secara praktis dalam menghadapi tekanan struktural, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan resistensi simbolik yang mereka lakukan sehari-hari.

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember merupakan perlawanan secara kultural dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Scott (1990), tindakan-tindakan tersebut menjadi salah satu cara bagi para kelompok yang tidak memiliki kuasa untuk tetap menyuarakan penolakan mereka dengan strategis dan simbolik. Melalui perlawanan sederhana namun bermakna ini, pedagang kaki lima menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar objek dari kebijakan, melainkan subjek yang aktif dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) terhadap kebijakan revitalisasi Alun-alun Jember dominan mengarah pada *hidden transcript* atau perlawanan tertutup. Sikap yang banyak dilakukan oleh para pedagang kaki lima adalah seperti sikap diam, memilih untuk menghindar, serta menyesuaikan strategi berdagang agar tetap bisa bertahan di tengah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. Bentuk resistensi ini tergambar jelas dalam sikap politik kolektif yang ditunjukkan oleh pedagang kaki lima dengan cara tidak memberikan dukungan terhadap bupati menjabat dalam pemilihan kepala daerah. Sikap ini mereka ambil sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai tidak melibatkan suara pedagang kaki lima dan berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan mereka.

Pedagang kaki lima juga melakukan berbagai bentuk adaptasi dan modifikasi terhadap strategi jualan yang mereka jalankan. Mereka berpindah tempat secara mandiri ke lokasi-lokasi alternatif seperti pelataran masjid atau trotoar jalan yang ramai, mengubah pola berdagang, serta terus saling berbagi informasi satu sama lain dalam jaringan paguyuban. Meski mengalami penurunan pendapatan bahkan hingga menjual aset pribadi seperti motor untuk menyambung hidup, mereka tetap bertahan demi mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlawanan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk demonstrasi atau aksi protes terbuka. Justru, strategi perlawanan yang dilakukan secara halus, terencana, dan penuh pertimbangan seperti yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Alun-alun Jember, menjadi bukti bahwa kelompok subordinat juga memiliki kekuatan sosial-politik dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak adil. Dalam konteks ini, resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima menggambarkan apa yang disebut

oleh James C. Scott sebagai “senjata kaum lemah”, yakni bentuk perlawanan yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi tetap efektif dalam menyuarakan ketidaksetujuan dan memperjuangkan ruang hidup mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan konteks revitalisasi ruang publik dan keberadaan pedagang kaki lima. Bagi pemerintah daerah, penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dengan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pedagang kaki lima. Proses sosialisasi yang melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat membantu mengurangi potensi resistensi serta menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah juga diharapkan menyediakan ruang alternatif yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi pedagang kaki lima.

Bagi pedagang kaki lima sendiri, penting untuk terus memperkuat solidaritas dan peran aktif paguyuban sebagai ruang advokasi dan pengorganisasian yang dapat memperkuat posisi mereka dalam merespons kebijakan publik. Di samping itu, kemampuan untuk beradaptasi juga menjadi kunci penting, baik dalam bentuk peningkatan kualitas produk, peningkatan pelayanan, maupun pemanfaatan ruang yang tersedia secara kreatif dan produktif.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam menggali lebih dalam sisi psikologis dan emosional para pedagang kaki lima terhadap dampak kebijakan revitalisasi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian pada aspek kesejahteraan mental pedagang kaki lima, atau mengembangkan studi dengan pendekatan lain seperti studi kebijakan publik, ekonomi politik, maupun perbandingan lintas daerah terhadap pola resistensi kelompok informal terhadap kebijakan revitalisasi ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public spaces*. Cambridge University Press, 15(2), 1–23.
- Dianee Ratu Haiu. (2022). *Alun-Alun Kota Bandung: Dari Tempat Sakral hingga Ruang Publik*. Minggu, 13 Februari. https://nationalgeographic.grid.id/read/133137049/alun-alun-kota-bandung-dari-tempat-sakral-hingga-ruang-publik?page=all&utm_source=chatgpt.com
- Digital, R. (2023). *Alun-Alun Jember Selalu Terbuka untuk UMKM, Ekonomi Kerakyatan Tetap Diperhatikan*. Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/791788576/alun-alun-jember-selalu-terbuka-untuk-umkm-ekonomi-kerakyatan-tetap-diperhatikan>
- Digital, R. (2024). *UPDATE Renovasi Alun-alun Jember, Wajah Baru Alun-Alun Mulai Tampak*. Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/795019055/update-renovasi-alun-alun-jember-wajah-baru-alun-alun-mulai-tampak>
- Hasrullah, H., Wisesa, H. R., Andani, I., & Daryono Daryono. (2024). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor*. 4(2), 134–144.
- Hilman, Y. A., Studi, P., Pemerintahan, I., & Ponorogo, U. M. (2018). *REVITALISASI KONSEP ALUN – ALUN SEBAGAI RUANG PUBLIK*: 3(1), 28–37.
- John W. Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (ke-3)*. Pustaka Pelajar.
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Maharani, A. (2023). *Eksternalitas Alun-alun Jember bagi Pedagang Kaki Lima*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/anggitamaharani_pwk_unej/642ed955eb51ce568b06d1a2/eksternalitas-alun-alun-jember-bagi-pedagang-kaki-lima?page=2&page_images=1
- Menteri Pekerjaan Umum. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 1–47.
- Miranto, S. (2016). *Tinjauan Fungsi Ekologis Alun-Alun Tradisional Jawa*.

Seminar Nasional Pendidikan IPA-Biologi FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, September, 135–141.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34016>

- Mufira, M., & Aisah, E. N. (2024). Dinamika Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota Jember DiTengah Persaingan Globalisasi: Peran UMKM Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Jember. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 237–246.
<https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/download/194/316/1109>
- Nida, M. M. (2014). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 166.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7647>
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19991>
- Perda Kabupaten Jember. (2015). Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. *Perda*, 1–138.
- Perda Kabupaten Jember. (2024). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*.
- Qomariyah Nur. (2019). *Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan “Revitalisasi” Alun-Alun Kota Gresik* [Universitas Jember].
<https://repository.unej.ac.id>
- Raditya, A., Fajrin, M., Perencanaan, J., Teknik, F., & Teknologi, I. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Pasar Besar* (2). 5(1).
- Scott, J. C. (1985). *Senjatanya Orang-orang yang Kalah* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*.
- Septiawan, F. A., & Ubaidillah, L. (2024). Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815>
- Sirajuddin, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In U. Hamzah (Ed.), *Juni* (1st ed., Vol. 1). Pustaka Ramadhan. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Suryaningsih Novita. (2019). *Resistensi Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di*

Sepanjang Jalan Colombo Yogyakarta [Universitas Gajah Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75268>

Susilowati, E. Z. (2018). Resistensi Tandak. *Bapala*, 5(2), 1–11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

	Bagian	Pertanyaan
1.	Perkenalan & latar belakang	Bisa kenalkan diri bapak/ibu? (nama, usia, sudah berapa lama berjualan di alun-alun?)
		Apa yang bapak/ibu jual di alun-alun?
		Seberapa penting alun-alun untuk usaha bapak/ibu?
2.	Dampak revitalisasi	Kapan pertama kali mendengar rencana revitalisasi alun-alun?
		Apa perasaan bapak/ibu saat tahu tentang kebijakan ini?
		Setelah ada revitalisasi, apakah pendapatan bapak/ibu berubah? Naik atau turun?
		Apakah tempat jualan yang baru nyaman atau ada kesulitan?
		Apakah pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan bagi pedagang kaki lima? Jika iya, apa bentuk bantuannya?
3.	Cara bertahan & perlawanan	Apa pendapat bapak/ibu tentang pemindahan pedagang kaki lima ke jalan ra kartini?
		Apakah bapak/ibu dan pedagang kaki lima lain pernah berusaha menolak kebijakan ini?
		Apakah ada aksi protes atau negosiasi dengan pemerintah?
		Jika ada, apa yang dilakukan pedagang kaki lima untuk bertahan? (tetap berjualan di tempat lama, demo, pindah sendiri, dll.)
		Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah adil dalam mengambil keputusan ini? Mengapa?
		Apakah ada kelompok atau organisasi yang membantu pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan ini? Siapa saja dan bagaimana mereka membantu?
		Selain demonstrasi atau negosiasi, apakah ada bentuk perlawanan lain yang dilakukan pedagang kaki lima? (misalnya, kembali berjualan di tempat lama, memperlambat kepatuhan Terhadap aturan, dll.)
		Apakah ada pedagang kaki lima yang mendapat hukuman atau sanksi karena tetap berjualan di tempat lama? Jika iya, bagaimana dampaknya bagi mereka?
		Menurut bapak/ibu, apakah perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima efektif? Mengapa?
4.	Harapan & saran	Apa harapan bapak/ibu untuk pemerintah mengenai pedagang kaki lima di alun-alun?
		Menurut bapak/ibu, solusi terbaik seperti apa agar pedagang kaki lima tetap bisa berjualan tanpa merugikan siapa pun?

		Ada hal lain yang ingin bapak/ibu sampaikan tentang kondisi pedagang kaki lima setelah revitalisasi?
		Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemungkinan adanya zona khusus pedagang kaki lima di alun-alun setelah revitalisasi? Apakah itu solusi yang baik?

Lampiran 2. Foto dokumentasi penelitian

Gambar 1. Denah Alun-alun Jember sebelum revitalisasi (sumber: internet, 2023)



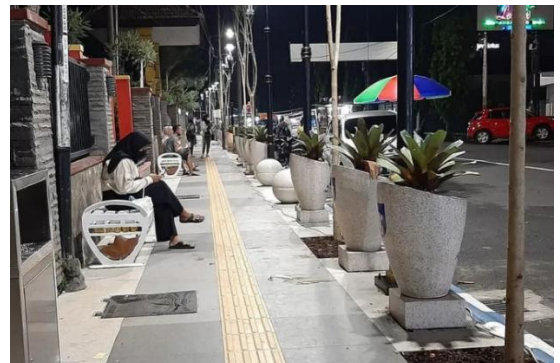
Gambar 2. Denah Alun-alun Jember setelah revitalisasi (sumber: internet, 2024)



Gambar 3. Kondisi Alun-alun Jember sebelum revitalisasi (sumber: internet, 2023)



Gambar 4. Jl. RA Kartini sebelum revitalisasi (sumber: internet, 2024)



Gambar 5. Kondisi Alun-alun Jember setelah revitalisasi (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 6. Jl. RA Kartini setelah revitalisasi (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 7. Kondisi Alun-alun Jember pagi hari (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 8. Informan 1 Bu Anggraeny pedagang kaki lima terdampak (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 9.. Informan 2 Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Ibu Susi (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 10. Informan 3 Bu Misradi Pedagang Kaki Lima Kopi Keliling (sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 11. Alun-alun setelah revitalisasi(sumber: dokumentasi pribadi)



Lampiran 3. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Laman : lp2m.unej.ac.id - Email : ijinpenelitian@gmail.com

Nomor : 01645 /UN25.3.1/LT/2025
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

20 Februari 2025

Yth. **Bupati**
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1130/UN25.1.2/SP/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Putri Ayu Pratna Paramita
NIM : 210910202127
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Sosiologi
Alamat : Jl Lumajang Depan SDN Jorongon 1, Kec. Leces, Kabupaten Probolinggo
Judul Penelitian : "Pedagang Kaki Lima dan Revitalisasi Alun-alun Jember : Analisis Bentuk Resistensi"
Lokasi Penelitian : Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Pelaksanaan : Bulan Februari-April 2025

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



a.n. Kepala
Sekretaris II,

Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011004

Tembusan Yth.
1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



Lampiran 4. Berita acara seminar proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Jember 68121
Telepon. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2025, bertempat di ruang 102 Fisip Universitas Jember telah berlangsung ujian seminar proposal atas :

Nama : PUTRI AYU PRATNA PARAMITA
NIM : 210910302127
Judul Proposal : PEDAGANG KAKI LIMA DAN REVITALISASI ALUN-ALUN
JEMBER: ANALISIS BENTUK RESISTENSI
Pembimbing I : Dr.Dodik Harnadi S.H.I., M.Sosio.
Pembimbing II : Nurina Adi Paramitha, S.Sos., M.Sos.
Pembahas I : Nurul Hidayat S.Sos., MUP
Pembahas II : Mukhammad Handy Dwi Wijaya M.Sosio.

Hasil ujian proposal penelitian dinyatakan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan :

- a. Lulus dengan tidak perbaikan
- b. Lulus dengan Perbaikan
- c. Mengulang

Demikian berita acara ujian proposal skripsi mahasiswa dibuat untuk digunakan sebagai dasar tindak lanjut proses berikutnya.

Jember, 31 Januari 2025

Dosen Pembimbing I

Dr.Dodik Harnadi S.H.I., M.Sosio.
NIP 198707042023211013

Dosen Pembimbing II

Nurina Adi Paramitha, S.Sos., M.Sos.
NIP 198907172022032013

Dosen Pembahas I

Nurul Hidayat S.Sos., MUP
NIP 197909142005011002

Dosen Pembahas II

Mukhammad Handy Dwi Wijaya M.Sosio.
NIP 199603112024061001



Lampiran 5. Transkrip wawancara



Lampiran 6. Rekaman wawancara

